



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kota Blitar



20 25



Jl. Trembesi no 13 Kota Blitar
(0342) 800104
email: disperta@blitarkota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025. LKjIP merupakan dokumen yang menjadi salah satu komponen dari siklus akuntabilitas yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan penyusunan LKjIP yang kemudian menjadi bahan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja tahun berikutnya. LKjIP yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 serta dokumen Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025 ini, adalah perwujudan akuntabilitas kinerja yang tercermin dari hasil pencapaian kinerja sesuai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan.

Sebagai salah satu dokumen evaluasi kinerja, melalui LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan dan program, sehingga dalam perumusan kebijakan dan program ke depannya dapat lebih tepat sasaran dan implementatif. Selain itu, melalui LKjIP ini akan dapat dicermati kendala yang ada dalam mengimplementasikan program dan kegiatan, mengetahui penyebab kegagalan sekaligus merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Demikian LKjIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025 ini, diharapkan semua pihak yang mendukungnya mampu melakukan evaluasi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya peningkatan pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab. Semoga LKjIP ini bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman serta ditindaklanjuti oleh semua pihak.

Blitar, 28 Pebruari 2026

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Dan Pertanian



Drh. Dewi Masitoh, M.Agr.
Pembina Tingkat 1 (IVb)
NIP. 197912062006042005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar atas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan selama satu tahun anggaran. Penyusunan laporan ini tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi strategis untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memberikan dampak nyata terhadap produktivitas sektor, kesejahteraan pelaku usaha, serta stabilitas pangan daerah.

Secara umum, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Seluruh indikator utama dalam Perjanjian Kinerja berada pada kategori “Sangat Berhasil”. Produktivitas sektor pertanian dan perikanan tetap terjaga, tercermin dari capaian PDRB kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai target sebesar 214,73 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa sektor primer masih menjadi salah satu penopang penting perekonomian daerah, meskipun berada dalam konteks kota dengan keterbatasan lahan pertanian.

Produksi tanaman pangan dan hortikultura mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Realisasi produksi mencapai 205.496,40 kwintal atau 93,35% dari target yang ditetapkan. Kenaikan ini terutama didorong oleh lonjakan produksi padi sawah yang meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian, beberapa komoditas palawija seperti jagung, ubi jalar, dan kacang tanah mengalami penurunan akibat pergeseran pola tanam serta pertimbangan harga pasar. Produksi sayuran menunjukkan dinamika yang beragam, dengan beberapa komoditas bernilai ekonomi tinggi mengalami peningkatan, sementara produksi buah relatif stagnan karena dipengaruhi faktor siklus tanaman tahunan dan kondisi iklim.

Pada subsektor peternakan, kinerja produksi menunjukkan tren yang menggembirakan. Produksi hasil peternakan mencapai 110.431,36 kwintal atau 105,86% dari target. Peningkatan ini terjadi setelah pemulihan dari dampak wabah penyakit hewan pada tahun-tahun sebelumnya, didukung oleh program vaksinasi, pelayanan kesehatan hewan, serta peningkatan pengawasan keamanan produk asal hewan. Komoditas daging dan telur menjadi kontributor utama pertumbuhan produksi, sementara produksi susu cenderung stabil.

Subsektor perikanan budidaya juga menunjukkan kinerja yang stabil dan konsisten. Produksi ikan konsumsi mencapai 2.524,10 kwintal, melampaui target yang ditetapkan. Komoditas lele tetap menjadi tulang punggung produksi, sementara nila dan

gurami menunjukkan peningkatan yang signifikan. Di sisi lain, produksi ikan hias mencapai 4.762.541 ekor dan kembali melampaui target, dengan ikan koi sebagai komoditas unggulan yang menopang pergerakan ekonomi lokal. Stabilitas ini mencerminkan efektivitas pembinaan teknis, pelatihan standar budidaya, serta dukungan promosi pasar.

Dari aspek ketahanan pangan, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 88,90 sesuai target, menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan masyarakat semakin baik dan berimbang. Sementara itu, tata kelola organisasi tetap terjaga dengan capaian Nilai SAKIP pada kategori A, menandakan konsistensi dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan manajemen kinerja berbasis hasil.

Keberhasilan capaian tahun 2025 tidak terlepas dari berbagai intervensi strategis, antara lain pembinaan intensif kepada kelompok tani dan pembudidaya, pelatihan budidaya padi sehat dan pupuk organik, pemanfaatan teknologi pertanian modern seperti sprayer drone, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian termasuk generasi muda. Dukungan kebijakan stabilisasi harga dan peningkatan akses pasar turut memperkuat daya tahan sektor.

Namun demikian, sejumlah tantangan tetap perlu diantisipasi, antara lain alih fungsi lahan, fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, serta kebutuhan peningkatan hilirisasi dan digitalisasi layanan. Oleh karena itu, arah kebijakan ke depan difokuskan pada optimalisasi lahan yang tersedia, penguatan pertanian ramah lingkungan, peningkatan nilai tambah produk, serta inovasi tata kelola yang adaptif dan responsif.

Secara keseluruhan, kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mampu menjaga stabilitas produksi, meningkatkan nilai ekonomi sektor, dan mempertahankan kualitas tata kelola organisasi. Fondasi yang telah dibangun menjadi modal penting untuk memperkuat ketahanan pangan dan daya saing sektor pertanian Kota Blitar secara berkelanjutan.

Blitar, 28 Pebruari 2026

EXECUTIVE SUMMARY

The 2025 Government Performance Report represents the accountability of the Department of Food Security and Agriculture of Blitar City for implementing its mandates in food security, agriculture, livestock, and fisheries throughout the fiscal year. Beyond fulfilling regulatory requirements, the report serves as a strategic evaluation tool to assess the effectiveness and impact of programs on sectoral productivity, economic value creation, and public welfare.

Overall, performance in 2025 was categorized as “Highly Successful.” All strategic indicators achieved or exceeded their respective targets. The Gross Regional Domestic Product (GRDP) of the agricultural, forestry, and fisheries sector reached 214,73 billion rupiah, meeting 100% of the target. This demonstrates that the primary sector continues to play a vital role in supporting the local economy despite limited agricultural land availability in an urban setting.

Food crops and horticulture production showed significant improvement compared to the previous year, reaching 205,496.40 quintals (93.35% of the target). The increase was largely driven by a substantial rise in paddy production. However, several secondary crops declined due to shifts in planting patterns and market price considerations. Vegetable production showed mixed trends, with high-value commodities increasing, while fruit production remained relatively stable due to seasonal cycles and climatic factors.

The livestock subsector recorded strong growth, with total production reaching 110,431.36 quintals (105.86% of target). This recovery followed disease outbreaks in previous years and was supported by vaccination programs, integrated animal health services, and enhanced veterinary supervision. Meat and egg production were the primary contributors to growth, while milk production remained relatively stable.

Aquaculture performance remained stable and consistent. Consumption fish production slightly exceeded the target, with catfish remaining the dominant commodity. Tilapia and gourami recorded notable growth, reflecting improved cultivation practices and market demand. Ornamental fish production also surpassed its target, reaching 4.76 million fish, with koi serving as the flagship commodity contributing significantly to the local economy.

From a food security perspective, the Food Consumption Pattern Score (PPH) reached 88.90, indicating improved dietary balance among the population. Institutional governance performance remained strong, with the agency maintaining a Grade A SAKIP

score, reflecting consistent implementation of performance-based management and accountability principles.

These achievements were supported by intensive farmer mentoring, sustainable agriculture training programs, adoption of modern agricultural technologies such as drone sprayers, and capacity-building initiatives targeting youth regeneration in agriculture. Market stabilization policies and improved market access further strengthened sector resilience.

Nevertheless, challenges remain, including land conversion, commodity price volatility, climate change impacts, and the need for greater downstream development and digital governance transformation. Future policy directions will therefore emphasize land optimization, environmentally sustainable agriculture, value-added processing, and adaptive institutional innovation.

In conclusion, the 2025 performance results demonstrate strong institutional capacity in maintaining sectoral productivity, enhancing economic value, and sustaining governance quality. The progress achieved provides a solid foundation for strengthening long-term food security and agricultural competitiveness in Blitar City.

Blitar, February 28, 2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Dasar Hukum	5
E. Aspek-Aspek Strategis	7
F. Isu-Isu Strategis	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis 2021-2026	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	11
C. Progres RTL Perbaikan LKjIP Tahun 2024	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran	15
B. Akuntabilitas Keuangan / Cost Per Outcome	55
C. Prestasi/Penghargaan	61
BAB IV PENUTUP	62
LAMPIRAN	
a. Matriks Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	
b. Rencana Kinerja Tahunan 2025	
c. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
d. Pengukuran Kinerja Tahun 2025	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance dan Clean Government*) merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang telah memberikan kewenangan utuh dan bulat kepada daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah, semangat reformasi di bidang politik, pemerintahan dan pembangunan juga mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, sehingga diperlukan sistem pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang dibuat melalui media pertanggungjawaban melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa Laporan Kinerja ditujukan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai ;
2. Sebagai upaya untuk perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, peranan LKjIP pada sebuah instansi adalah agar instansi dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan rencana serta sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Disamping sebagai kewajiban, maka penerapan SAKIP pada hakekatnya merupakan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan

pembangunan yang berkualitas baik dari sisi perencanaan pelaksanaan maupun hasil-hasilnya yang dilaporkan dalam bentuk LKjIP sebagai bentuk pertanggungjawaban konkrit atas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyusunan LKjIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi, memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (*responsibilitas*) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan
- e. Pengkajian pemberian izin serta pencabutan izin bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan
- f. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
- g. Peremajaan data dalam bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan untuk tingkat kota

- h. Koordinasi penyediaan infrasertuktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
- i. Pengembangan sarana prasarana pertanian
- j. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak
- k. Pembinaan produksi di bidang pertanian
- l. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan
- m. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
- n. Pelaksanaan penyuluhan pertanian
- o. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, katatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan
- p. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja
- q. Penyenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor
- r. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- s. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- t. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan
- u. Pengelolaan pengaduan masyarakat
- v. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah
- w. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian
- a. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai kewenangan :

- a. Penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;
- b. Perencanaan operasional program ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;
- c. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan, di tingkat kota;
- d. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan.

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang.
- c. Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan
- e. Bidang Peternakan
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

C. Maksud Dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar selama satu Tahun 2025, dengan tujuan :

- 1) Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Pemerintah Kota Blitar, Propinsi, Pusat maupun Masyarakat;
- 2) Memberikan informasi capaian sasaran pembangunan daerah guna penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Kota Blitar tahun 2025-2029);
- 3) Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan datang;
- 4) Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

D. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
21. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
23. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

24. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

E. Aspek – Aspek Strategis

Sebagai pengemban urusan pangan, pertanian dan perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki aspek-aspek strategis yang dapat menunjang dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Terjalannya hubungan yang baik antara Dinas Ketahanan Pangan dengan instansi-instansi vertikal terkait.
2. Terjalannya hubungan yang baik antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar dengan mitra kerja (petani, pelaku agribisnis, penyedia saprodi, dll.)
3. Antusiasme petani terhadap perkembangan-perkembangan baru di bidang pertanian yang diakomodasi dalam program-program Dinas.
4. Tanggapan positif petani terhadap isu pertanian berwawasan lingkungan isu peningkatan daya saing produk pertanian.
5. Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2025-2029 untuk peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan; peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan serta peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi dan industrialisasi bidang pertanian dan pangan.

F. Isu – Isu Strategis

Sedangkan isu – isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Belum meratanya kemandirian pangan sehingga mengakibatkan kerentanan masyarakat terhadap fluktuasi harga pangan.
2. Penurunan luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan tidak memungkinkan adanya ekstensifikasi budidaya.
3. Belum optimalnya daya dukung lahan terhadap peningkatan produksi pertanian.
4. Perdagangan bebas komoditas pertanian dan perikanan mensyaratkan adanya standarisasi dan diversifikasi produk untuk mampu bersaing.
5. Masih kurangnya peningkatan tata kelola administrasi perangkat daerah (perencanaan dan akuntabilitas kinerja) yang efektif dan efisien.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu dengan memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam perencanaan kinerja disusun suatu tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia.

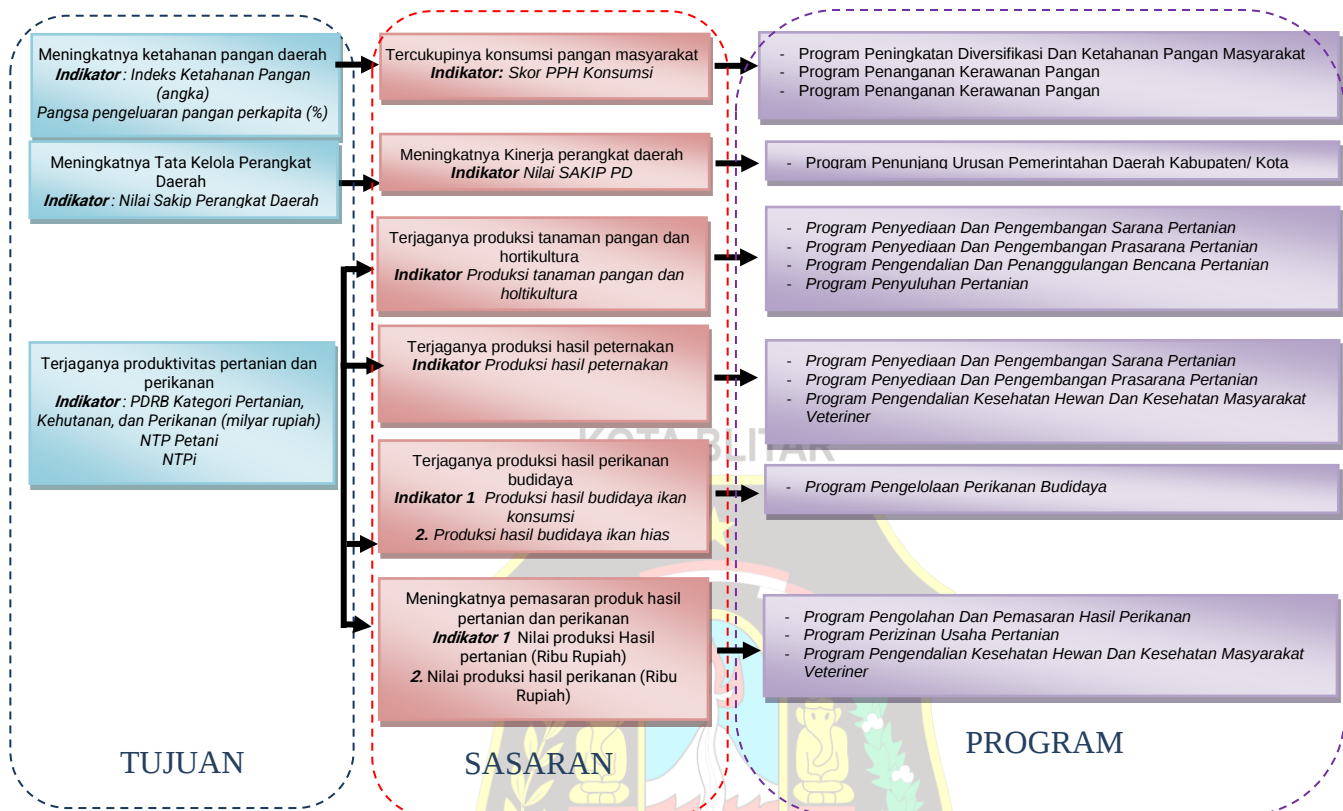
A. Rencana Strategis 2021-2026

Rencana Strategis adalah merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah **Terwujudnya Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermatabat**. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar sebagai salah satu pengampu indikator kinerja utama dari misi ke-4 yaitu “: *Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital*”.

Berpedoman pada visi Pemerintah Kota Blitar tersebut maka tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang tertuang dalam Perubahan Ketiga Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Bagan 2.2
Matrik Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar



Sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) dari Pemerintah Kota Blitar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar akan secara aktif ikut mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar dengan tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2025 yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar perlu menata semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelaksanaannya baik personil, sarana prasarana, anggaran yang tersedia serta piranti lunak lainnya untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Penataan komponen pendukung salah satunya dapat dilakukan melalui penyusunan rencana program kerja tahunan PD dengan menetapkan Tujuan, Sasaran dan Program Kerja yang akan dipedomani sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi personil dalam mengoperasionalkan semua potensi yang ada guna mewujudkan hasil yang direncanakan. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk pencapaian visi

dan misi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam Perubahan Ketiga Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2021-2026 sebagaimana berikut :



Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target		
				2024	2025	2026
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan			75,18	75,68	76,18
	Pangsa Pengeluaran Pangan Per Kapita			42,36 %	42,16 %	41,96 %
		Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	86,75	87	88,5
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan			198,8 milyar rupiah	199,79 milyar rupiah	200,79 milyar rupiah
	Nilai Tukar Petani			101,67	102,17	102,67
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan			101	101,5	102
		Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	198.325,67 kwintal	198.444,66 kwintal	198.563,73 kwintal
			Jumlah produksi hasil peternakan	84827,72 kwintal	85042,36 kwintal	85356,3 kwintal
			Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi	2.489,33 kwintal	2.519,10 kwintal	2.549,33 kwintal
			Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias	4.740.863 ekor	4.762.197 ekor	4.783.627 ekor
		Meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan	Nilai produksi hasil pertanian	92.181.425.080 rupiah	94.025.053.580 rupiah	95.905.554.660 rupiah
			Nilai produksi hasil perikanan	34.977.794.390 rupiah	35.677.350.270 rupiah	36.390.897.280 rupiah
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			84,73 (A)	84,75 (A)	84,77 (A)
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,73 (A)	84,75 (A)	84,77 (A)

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Blitar

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Skor PPH Konsumsi	Angka	86,25	86,5	86,75	87	88,5
2	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	Kwintal	198.186,93	198.206,74	198.325,67	198.444,66	198.563,73
3	Jumlah produksi hasil peternakan	Kwintal	84.322	84.651	84.828	85.042	85.356
4	Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi	Kwintal	2.404,80	2.464,92	2.489,33	2.519,10	2.549,33
5	Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias	ekor	4.698.482	4.719.626	4.740.864	4.762.198	4.783.628

Adapun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2021–2026 secara terperinci sebagaimana dalam “Lampiran 1. Matriks Perubahan Ketiga Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2021 – 2026”.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Ketiga Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2025. Pada tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga mendapatkan pelimpahan kinerja dari Walikota Blitar yaitu terjaganya produktifitas pertanian dan perikanan, sehingga terdapat perbedaan perjanjian kinerja dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	200,43 Milyar
2.	Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	220.141,42 kwintal
		Jumlah produksi hasil peternakan	104.320 kwintal
		Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi	2.510 kwintal
		Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias	4.743.000 ekor
3.	Meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan	Nilai produksi hasil pertanian	116.429.221 (000 rupiah)
		Nilai produksi hasil perikanan	38.018.313 (000 rupiah)
4.	Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	88,90
5.	Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,25)

Sedangkan Rencana Kinerja (RKT) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025.

C. Progres RTL Perbaikan LKjIP Tahun 2024

Sebagai bentuk keberlanjutan atas pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2024, maka sudah ditetapkan langkah-langkah perbaikan dalam rangka pencapaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya atas kendala atau permasalahan yang dihadapi. Guna mengetahui progress langkah-langkah perbaikan tersebut, maka perlu kami laporkan hasilnya sebagai berikut :

Tabel 2.4
Progres Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKj IP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Progras		Keterangan
				Sudah	Belum	
1	Belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman pangan	Peningkatan produksi tanaman pangan lebih difokuskan pada peningkatan daya dukung / kapasitas lahan pertanian.	- Program Penyuluhan Pertanian - Kegiatan Pelaksanaan penyuluhan pertanian - Sub Kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	√		Pada tahun 2025 telah dilaksanakan Pelatihan pembuatan Pupuk Organik dan pendampingan PTPS

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Progras		Keterangan
				Sudah	Belum	
2	Peningkatan alih fungsi lahan	Pengendalian alih fungsi lahan melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).	- Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian - Kegiatan Pengembangan prasarana pertanian - Sub kegiatan penyusunan peta kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten/kota	✓		Pada tahun 2025 telah Konsultasi LP2B dengan Kemenkumham
3	Bekum optimalnya kualitas evaluasi dan perencanaan kinerja	Peningkatan kualitas evaluasi dan perencanaan kinerja.	- Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	✓		Pada tahun 2025 telah dilaksanakan pengembangan aplikasi SiPetani yang merupakan aplikasi data pangan, pertanian dan perikanan
			- Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota - Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	✓		Pada tahun 2025 telah dilaksanakan sosialisasi evaluasi kinerja dan tindak lanjut hasil evaluasi.
4	Belum optimalnya kualitas dan nilai tambah serta jangkauan pemasaran produk pertanian dan perikanan.	Peningkatan kualitas dan nilai tambah produk perikanan serta memperluas jangkauan pemasaran	- Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan - Kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil - Sub Kegiatan pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	✓		- Pada tahun 2025 telah dilaksanakan pelatihan pemasaran hasil perikanan dengan pemanfaatan platform digital bekerjasama dengan Sophee Indonesia - Pada tahun 2025 telah dilaksanakan pelatihan pengemasan hasil olahan perikanan.
		Peningkatan kualitas dan nilai	- Program Penyuluhan Pertanian	✓		Pada tahun 2025 telah dilaksanakan

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Progras		Keterangan
				Sudah	Belum	
		tambah produk pertanian serta memperluas jangkauan pemasaran	- Kegiatan Pelaksanaan penyuluhan pertanian - Sub Kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa			pelatihan diversifikasi produk hasil pertanian dengan sasaran TP penggerak PKK se Kota Blitar.

KOTA BLITAR



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja pada tahun 2025 realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2024), serta realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2021-2026.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

A.1 Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target Dan Realisasi Tahun 2025

Analisa dan evaluasi dilakukan terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Hal ini akan bermanfaat untuk penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Target dan realisasi kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

**Pencapaian Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Blitar Tahun Anggaran 2025**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Inteprestasi Capaian
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Milyar	200,43	214,73	107,13	Sangat Berhasil
Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	kwintal	220.141,42	205.496,40	93,35	Sangat Berhasil
	Jumlah produksi hasil peternakan	kwintal	104.320,00	110.431,36	105,86	Sangat Berhasil
	Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi	kwintal	2.510,00	2.524,10	100,56	Sangat Berhasil
	Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias	ekor	4.743.000	4.762.541	100,41	Sangat Berhasil
Meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan	Nilai produksi hasil pertanian	000 rupiah	116.429.221	144.256.288,00	123,90	Sangat Berhasil
	Nilai produksi hasil perikanan	000 rupiah	38.018.313	38.055.118,00	100,10	Sangat Berhasil
Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Indeks	88,90	88,90	100,00	Sangat Berhasil
Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	A (85,25)	A (85,25)	100,00	Sangat Berhasil

A.1.1 Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan

Indikator Kinerja : PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Grafik 3.1
PDRB ADHB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Blitar
Tahun 2023-2024



Produk Domestik Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor pertanian yang tumbuh dari suatu daerah. Dengan kata lain PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah dalam suatu waktu tertentu. Dalam menyusun PDRB digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu lapangan usaha dan pengeluaran yang menghasilkan komposisi data nilai tambah dirinci menurut lapangan usaha baik yang dihitung berdasarkan harga berlaku maupun harga konstans. Dalam pengukuran produktivitas pertanian dan perikanan digunakan indikator PDRB menurut lapangan usaha berdasarkan harga berlaku sektor pertanian dan perikanan yang dapat menggambarkan kemampuan sumberdaya ekonomi sektor pertanian dan perikanan di Kota Blitar. Untuk Kota Blitar, PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dihitung dari komponen produk primer dari sub sektor pertanian (pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian) dan sub sektor perikanan, dikarenakan Kota Blitar tidak memiliki hutan. Berdasarkan data capaian tahun 2024 dan 2025, PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2024, realisasi tercatat sebesar Rp200,43 miliar dari target Rp213,52 miliar atau sekitar 93–94 persen capaian. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kinerja sektor masih menghadapi tekanan sehingga belum mampu mencapai target yang ditetapkan.

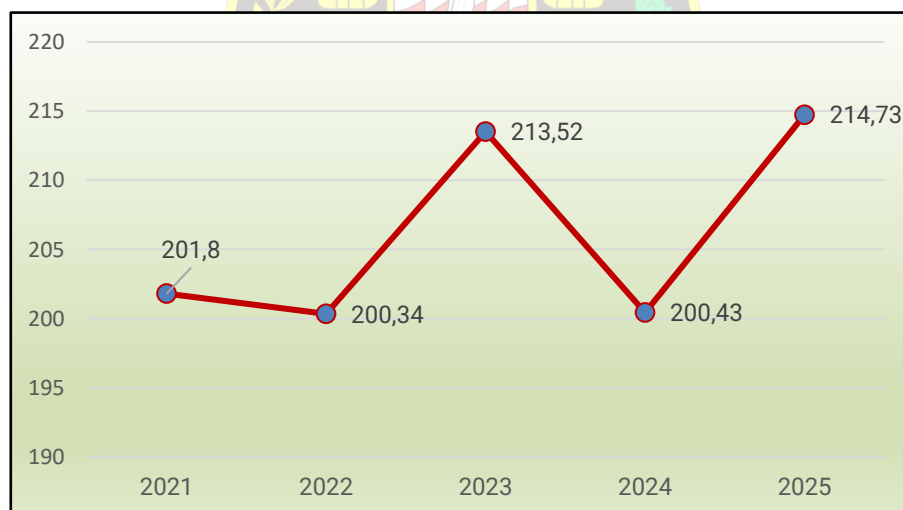
Namun pada tahun 2025, terjadi perbaikan kinerja yang cukup kuat. Realisasi meningkat menjadi Rp214,73 miliar dan melampaui target sebesar Rp200,43 miliar, dengan

tingkat capaian sekitar 107 persen. Secara nominal, terjadi pertumbuhan sekitar 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya pemulihan dan penguatan kinerja sektor secara berkelanjutan.

Kota Blitar memiliki karakteristik wilayah perkotaan dengan keterbatasan lahan, namun tetap mampu menjaga kontribusi sektor pertanian dan perikanan melalui pola intensifikasi dan peningkatan nilai tambah. Peningkatan realisasi tahun 2025 mengindikasikan adanya perbaikan produktivitas, efisiensi usaha, serta kemungkinan peningkatan aktivitas pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Dengan struktur wilayah yang relatif sempit, pertumbuhan lebih banyak didorong oleh optimalisasi teknologi, manajemen usaha, dan penguatan rantai pasok dibandingkan ekspansi lahan.

Ke depan, penguatan hilirisasi, diversifikasi komoditas yang adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani dan pelaku perikanan, serta integrasi pasar lokal dengan jaringan distribusi provinsi menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan dan meningkatkan daya saing sektor di Kota Blitar.

Grafik 3.2
PDRB ADHB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Blitar
Tahun 2021-2025 (dalam Milyar Rupiah)



Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Blitar selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun cenderung meningkat pada akhir periode. Berdasarkan data, nilai PDRB tercatat sebesar Rp201,80 miliar pada tahun 2021, kemudian sedikit menurun menjadi Rp200,34 miliar pada tahun 2022. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan

menjadi Rp213,52 miliar, selanjutnya kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi Rp200,43 miliar, dan meningkat kembali pada tahun 2025 hingga mencapai Rp214,73 miliar sebagai capaian tertinggi selama lima tahun terakhir.

Fluktuasi tersebut mencerminkan adanya pengaruh berbagai faktor eksternal maupun internal. Pada periode 2021–2022, sektor pertanian dan perikanan masih berada dalam fase penyesuaian pascapandemi serta menghadapi tekanan kenaikan harga input produksi, termasuk pupuk dan pakan. Kondisi ini berdampak pada stabilitas nilai produksi dan menyebabkan perlambatan pertumbuhan.

Peningkatan signifikan pada tahun 2023 menunjukkan adanya pemulihan produksi dan membaiknya harga komoditas pertanian. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi koreksi yang diduga dipengaruhi oleh faktor iklim, khususnya dampak fenomena El Niño yang memengaruhi produktivitas tanaman pangan dan ketersediaan air. Tekanan tersebut bersifat sementara, terbukti pada tahun 2025 sektor ini kembali menunjukkan kinerja yang kuat dengan pertumbuhan positif dan nilai tertinggi sepanjang periode pengamatan.

Karakteristik Kota Blitar sebagai wilayah perkotaan dengan keterbatasan lahan pertanian menjadikan strategi pembangunan sektor ini lebih bertumpu pada intensifikasi, peningkatan produktivitas, dan penciptaan nilai tambah melalui pengolahan hasil. Pertumbuhan pada tahun 2025 mengindikasikan bahwa upaya peningkatan efisiensi produksi, penguatan kelembagaan petani dan pelaku usaha, serta dukungan program pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil yang positif.

Secara keseluruhan, perkembangan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Blitar selama tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa sektor ini tetap menjadi salah satu penopang penting perekonomian daerah. Meskipun menghadapi fluktuasi akibat dinamika global dan faktor iklim, sektor ini mampu beradaptasi dan kembali tumbuh positif. Dengan penguatan strategi produksi, nilai tambah, dan ketahanan terhadap risiko eksternal, sektor pertanian dan perikanan di Kota Blitar berpotensi terus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Beberapa faktor pendorong kinerja sektor ini antara lain :

1. Peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih unggul dan teknologi budidaya.
2. Pengembangan usaha pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Di sisi lain, sektor ini masih menghadapi sejumlah permasalahan antara lain :

1. Keterbatasan lahan pertanian.

2. Masih tingginya kerentanan sector pertanian dan perikanan terhadap perubahan iklim.
3. Fluktuasi harga input produksi (pakan).
4. Skala usaha pertanian, perikanan dan peternakan yang relatif kecil.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan langkah strategis yang berkelanjutan, antara lain:

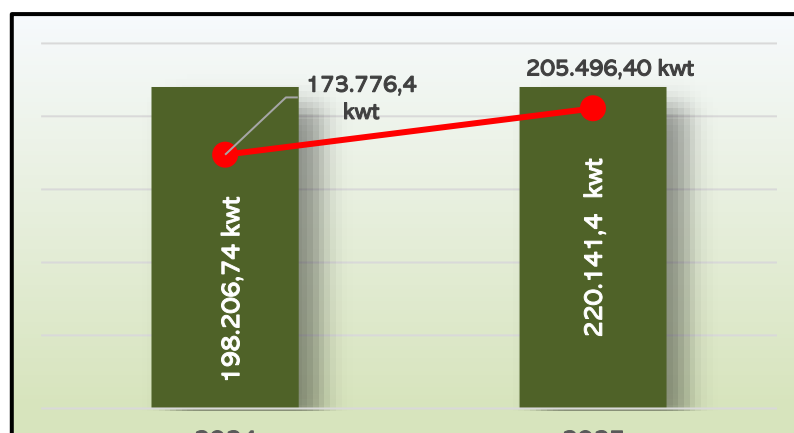
1. Penguatan adaptasi terhadap perubahan iklim melalui pembinaan dan penerapan teknologi.
2. Pengembangan sistem irigasi dan budidaya hemat sumber daya.
3. Peningkatan hilirisasi dan sertifikasi produk
4. Perluasan akses pasar berbasis digital.
5. Program regenerasi petani dan pelaku usaha perikanan.
6. Optimalisasi cadangan pangan daerah dan penguatan kerja sama distribusi antarwilayah di Jawa Timur menjadi penting untuk menjaga stabilitas harga dan kesinambungan pasokan.

A.1.2 Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan

Indikator Kinerja 1 : Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura

Sebagai daerah perkotaan, ketersediaan pangan di Kota Blitar lebih banyak didukung oleh perdagangan antar daerah disekitarnya. Akan tetapi walaupun bukan sebagai penyedia utama dalam pemenuhan ketersediaan pangan daerah, sub sektor tanaman pangan dan hortikultura tetap memegang peranan penting dalam pergerakan perekonomian di Kota Blitar. Selain itu untuk menjamin ketersediaan pangan minimal seperti yang diamanatkan dalam undang-undang, setiap daerah harus memiliki lahan abadi untuk produksi pangan berkelanjutan yang disebut sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Peningkatan produktivitas pertanian dapat dilihat dari kemampuan lahan memproduksi dalam 1 (satu) tahun. Jumlah produksi total yang dihasilkan berasal dari produksi tanaman pangan dan hortikultura yang diusahakan dalam satu tahun.

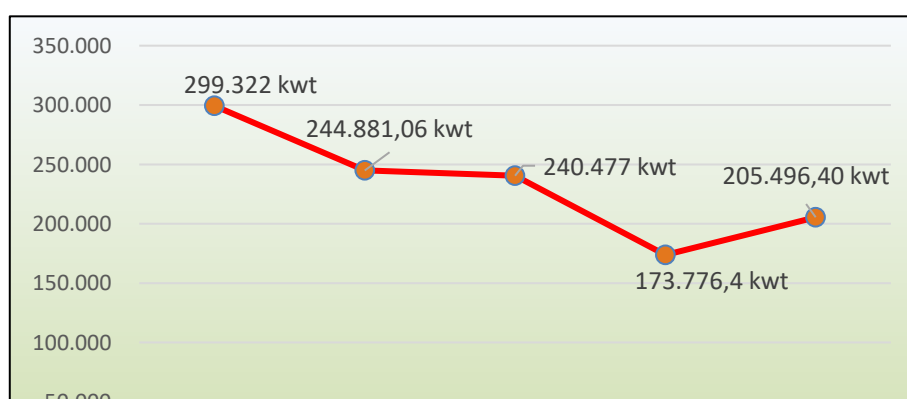
Grafik 3.3
Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kwintal) Tahun 2024 - 2025



Produksi tanaman hortikultura menunjukkan peningkatan dari tahun 2024 ke tahun 2025, baik dari sisi target maupun realisasi produksi. Pada tahun 2024, target produksi hortikultura ditetapkan sebesar 198.206,74 kwintal, dengan realisasi mencapai 173.776,4 kwintal atau sekitar 87,7% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2025, terjadi peningkatan target produksi menjadi 220.141,4 kwintal, seiring dengan upaya peningkatan produktivitas dan pengembangan komoditas hortikultura. Realisasi produksi tahun 2025 juga mengalami peningkatan signifikan menjadi 205.496,40 kwintal, atau sekitar 93,3% dari target. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja produksi dibandingkan tahun sebelumnya, baik dari sisi volume produksi maupun persentase pencapaian target.

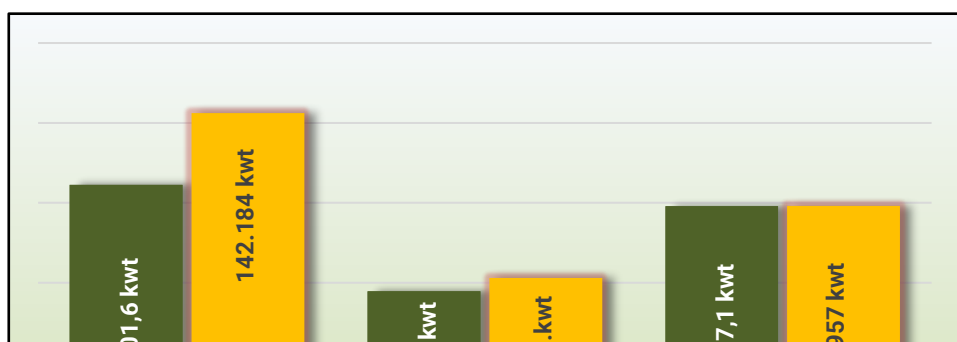
Secara keseluruhan, realisasi produksi hortikultura meningkat sekitar 31.720 kwintal atau sebesar 14,40% dari tahun 2024 ke 2025. Selain itu, selisih antara target dan realisasi semakin kecil, yang menandakan peningkatan efektivitas program dan kegiatan pengembangan hortikultura. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai upaya peningkatan produktivitas, perbaikan sarana produksi, serta dukungan teknis kepada petani mulai menunjukkan hasil yang optimal, sehingga diharapkan pada tahun-tahun berikutnya capaian produksi dapat semakin mendekati bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Grafik 3.4
Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kwintal) Tahun 2021-2025



Produksi tanaman hortikultura selama periode 2021–2025 menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis dengan kecenderungan penurunan hingga tahun 2024, kemudian kembali meningkat pada tahun 2025. Pada tahun 2021, produksi hortikultura tercatat sebesar **299.322 kwintal**, yang menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun pada tahun 2022, produksi mengalami penurunan cukup signifikan menjadi **244.881,06 kwintal**, atau turun sekitar **18,2%** dibandingkan tahun sebelumnya. Tren penurunan masih berlanjut pada tahun 2023, meskipun dengan penurunan yang relatif kecil. Produksi tercatat sebesar **240.477 kwintal**, turun sekitar **1,8%** dari tahun 2022. Penurunan paling tajam terjadi pada tahun 2024, dengan realisasi produksi sebesar **173.776,4 kwintal**, atau turun sekitar **27,7%** dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2025, produksi hortikultura menunjukkan tanda pemulihan dengan realisasi mencapai **205.496,40 kwintal**. Angka ini meningkat sekitar **18,3%** dibandingkan tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan produksi, dukungan program pemerintah, serta meningkatnya kembali aktivitas budidaya hortikultura oleh petani. Sedangkan produksi per jenis tanaman dapat dilihat dari diagram dibawah ini.

Grafik 3.5
Produksi Tanaman Pangan, Sayuran dan Buah-Buahan (Kwintal)
Tahun 2024 - 2025



Produksi tanaman hortikultura tahun 2024–2025 menunjukkan kecenderungan meningkat pada seluruh kelompok komoditas, meskipun dengan besaran persentase yang berbeda pada masing-masing komoditas. Pada kelompok tanaman pangan hortikultura, produksi tahun 2024 sebesar 111.201,6 kwintal meningkat menjadi 142.184 kwintal pada tahun 2025. Terjadi kenaikan produksi sebesar 30.982,4 kwintal atau sekitar 27,86%. Peningkatan ini merupakan yang tertinggi dibandingkan komoditas lainnya dan mengindikasikan adanya perbaikan signifikan pada luas tanam, produktivitas, serta dukungan sarana produksi dan budidaya.

Pada komoditas sayuran, produksi meningkat dari 4.647,7 kwintal pada tahun 2024 menjadi 5.055,5 kwintal pada tahun 2025. Kenaikan sebesar 407,8 kwintal tersebut setara dengan peningkatan sekitar 8,77%. Meskipun tidak sebesar tanaman pangan hortikultura, peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan aktivitas budidaya dan permintaan pasar yang cukup stabil terhadap komoditas sayuran.

Sementara itu, produksi buah-buahan relatif stabil. Produksi tahun 2024 tercatat 57.927,1 kwintal dan meningkat sangat tipis menjadi 57.957 kwintal pada tahun 2025. Kenaikan sebesar 29,9 kwintal atau sekitar 0,05% menunjukkan bahwa produksi buah cenderung stagnan, dengan pertumbuhan yang sangat terbatas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa produksi buah mampu dipertahankan, namun belum mengalami peningkatan signifikan.

Tabel. 3.2
Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
Tahun 2024 - 2025

No.	Komoditas	Tahun		% Peningkatan / Penurunan
		2024	2025	

A	TANAMAN PANGAN			
1	Padi Sawah	36.242	81.951	126,12
2	Jagung Sawah	70.849	57.693	-18,57
4	Ubi Kayu	0	200	100,00
5	Ubi Jalar/Ketela Rambat	2.751	1.540	-44,02
6	Kacang Tanah	1.360	800	-41,18
	Jumlah Tanaman Pangan	111.202	142.184	27,86
B	SAYUR - SAYURAN			
1	Kubis	60	380	533,33
2	Petsai/Sawi	376	140	-62,77
3	Kacang Panjang	72	8	-88,89
4	Cabe Besar	172	24	-86,05
5	Cabai Keriting	0	575	100,00
6	Cabe Rawit	1.748	2.058	17,73
7	Jamur	355	347	-2,14
8	Tomat	94	92	-2,13
9	Terung	871	970	11,37
10	Ketimun	0	60	100,00
11	Kangkung	900	701	-22,11
	Jumlah Sayur - Sayuran	4.648	5.355	15,22
C.	BUAH BUAHAN			
1	Melon	30	30	0,00
2	Semangka	0	180	100,00
3	Alpukat	1.190	1.145	-3,82
4	Belimbing	31.539	32.064	1,66
5	Duku/Langsar/Kokosan	62	63	0,81
6	Durian	483	476	-1,45
7	Jambu Biji	162	181	11,42
8	Jambu Air	190	174	-8,37
9	Jeruk Siam/Keprook	137	137	0,00
10	Mangga	7.598	7.515	-1,09
11	Manggis	66	66	0,00
12	Nangka	234	234	0,00
13	Pepaya	6.277	5.869	-6,50
14	Pisang	664	715	7,68
15	Rambutan	9.091	8.903	-2,07
16	Salak	0	18	100,00
17	Sawo	126	141	11,67
18	Sirsak	47	29	-38,30
19	Sukun	31	19	-38,39
	Jumlah Buah - Buahan	57.927	57.957	0,05

Produksi komoditas pertanian tahun 2024–2025 menunjukkan dinamika yang cukup beragam antar kelompok komoditas. Secara total, tanaman pangan dan sayuran mengalami peningkatan produksi yang cukup signifikan, sedangkan buah-buahan relatif stagnan dengan kenaikan yang sangat kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan produksi belum merata pada seluruh komoditas dan masih dipengaruhi oleh faktor teknis budidaya, iklim, serta minat tanam petani.

Total produksi tanaman pangan meningkat dari 111.202 kwintal (2024) menjadi 142.184 kwintal (2025) atau naik 27,86%. Komoditas yang meningkat adalah padi sawah dan ubi kayu. Padi sawah naik sangat signifikan dari 36.242 menjadi 81.951 kwintal

(+126,12%). Kenaikan ini menjadi kontributor utama peningkatan total tanaman pangan dan menunjukkan keberhasilan peningkatan luas tanam atau produktivitas. Ubi kayu meningkat dari 0 menjadi 200 kwintal (+100%), menandakan mulai berkembangnya kembali budidaya komoditas ini.

Komoditas yang mengalami penurunan adalah jagung, ubi jalar dan kacang tanah. Jagung sawah mengalami penurunan -18,57%, dari 70.849 menjadi 57.693 kwintal. Ubi jalar mengalami penurunan sebesar -44,02%. Sedangkan Kacang tanah mengalami penurunan sebesar -41,18%. Penurunan pada jagung, ubi jalar, dan kacang tanah mengindikasikan adanya peralihan pola tanam ke padi sawah yang lebih menguntungkan karena faktor harga jual dan permintaan pasar, dan keterbatasan lahan atau input produksi. Peningkatan tanaman pangan sangat bergantung pada lonjakan produksi padi sawah, sementara komoditas palawija cenderung mengalami penurunan. Dalam rangka percepatan swasembada beras, pada tahun 2025 pemerintah mengeluarkan program serapan gabah melalui Bulog, dimana Bulog wajib membeli gabah hasil panen petani sesuai dengan harga yang telah ditetapkan yaitu Rp. 6.500,00 dalam bentuk gabah kering panen.

Jumlah produksi sayuran meningkat dari 4.648 kwintal menjadi 5.355 kwintal atau naik 15,22%. Komoditas yang mengalami peningkatan tajam adalah Kubis meningkat 533,33% (60 → 380 kwintal), Cabai keriting dari 0 menjadi 575 kwintal (+100%), Ketimun dari 0 menjadi 60 kwintal (+100%), Cabai rawit meningkat 17,73% dan terung meningkat 11,37%. Peningkatan ini menunjukkan adanya Pergeseran minat tanam ke komoditas hortikultura bernilai ekonomi tinggi serta respons terhadap permintaan pasar dan harga yang relatif baik.

Sedangkan Komoditas yang mengalami penurunan adalah kacang panjang turun sangat tajam -88,89%, Cabai besar turun -86,05%, petsai/sawi turun -62,77%, Kangkung turun -22,11%, Jamur dan tomat turun tipis sekitar -2%. Penurunan tajam pada beberapa komoditas sayuran mengindikasikan adanya Sensitivitas terhadap cuaca dan hama, Fluktuasi harga pasar serta Pergeseran ke komoditas yang lebih menguntungkan.

Sedangkan untuk produksi buah-buahan relatif stagnan dari 57.927 kwintal menjadi 57.957 kwintal atau hanya naik 0,05%. Komoditas yang mengalami peningkatan adalah semangka, salak, jambu biji, sawo, pisang dan belimbing. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan adalah Pepaya, Rambutan, Mangga, Alpukat, Sirsak dan sukun. Sebagian besar buah tahunan cenderung stabil atau menurun karena Siklus produksi

tanaman tahunan, pengaruh iklim terhadap pembungaan serta keterbatasan peremajaan tanaman.

Untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura, pada tahun 2025 telah dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani, gabungan kelompok tani dan kelompok wanita tani secara rutin. Pada Tahun 2025 juga dilaksanakan pelatihan dan pemberian bantuan pembuatan pupuk organik dan budidaya padi sehat (PTPS) yang kedepannya akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Pelatihan PTPS di berikan kepada 25 orang petani yang berkomitmen untuk menerapkan budidaya padai dengan system PTPS. Sedangkan pelatihan dan pemberian bantuan peralatan pembuatan pupuk organik diberikan kepada 10 kelompok tani. yaitu Poktan Maju Makmur Kel. Ngadirejo, Poktan Rumpun Tani 4 Kel. Tanggung, Gapoktan Sri Lestari Kel. Blitar, Poknak Sumber Makmur Kel. Sentul, Poktan Sido Mulyo Kel. Plosokerep, Pelatihan Pupuk Organik Level 2 Gapoktan Margo Mulyo Kel. Karang Sari, Poktan Ngudi Makmur 1 Kel. Karangtengah, Poktan Subur Rejeki Kel. Sananwetan, Poktan Budi Luhur Kel. Ngadirejo, Poktan Sido Mulyo 1 Kel. Sentul. Peningkatan penggunaan pupuk organik selain untuk memenuhi kebutuhan pupuk akibat berkurangnya jumlah subsidi pupuk juga untuk mewujudkan pertanian yang berwawasan lingkungan yang nantinya mampu meningkatkan produksi tanaman dan kualitas hasil panen dan menurunkan emisi gas rumah kaca.

Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM petani, pada tahun 2025 juga dilaksanakan pelatihan dan pembinaan pada kelompok wanita tani (KWT) budidaya tanaman di pekarangan baik sayuran maupun tanaman hias yaitu pelatihan budidaya tanaman hias export dengan sistem irigasi sprinkle with IoT dan budidaya tanaman melon. Selain itu, KWT juga diberikan pelatihan tentang pengolahan daging dan susu. Hal itu diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk hasil peternakan di pasaran sera mampu memberikan manfaat ekonomi bagi anggota kelompok wanita tani.

Sebagai upaya untuk mendorong regenerasi petani, dilaksanakan pelatihan agroteknologi untuk petani muda dengan memanfaatkan teknologi modern seperti sprayer drone. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk mengubah pola pikir generasi muda bahwa sektor pertanian memiliki prospek yang menjanjikan dan dapat dikelola secara profesional dengan memanfaatkan teknologi.

Beberapa faktor pendorong terjaganya produksi hasil tanaman pangan dan hortikultura adalah :

1. Masih tingginya minat petani terhadap perkembangan teknologi di bidang pertanian

2. Banyaknya kelompok tani aktif yang mempermudah dan mempercepat penyebaran teknologi pertanian.
3. Adanya program pemberian bantuan modal usaha berupa saprodi dan alsintan melalui APBN, APBD Prop maupun dana khusus seperti DBHCHT.

Sedangkan beberapa faktor yang menghambat terjaganya produksi hasil pertanian adalah :

1. Perubahan iklim dan cuaca ekstrem, mengakibatkan menurunnya produktivitas tanaman.
2. Terjadinya alih fungsi lahan terus menerus.
3. Masih tingginya biaya produksi.

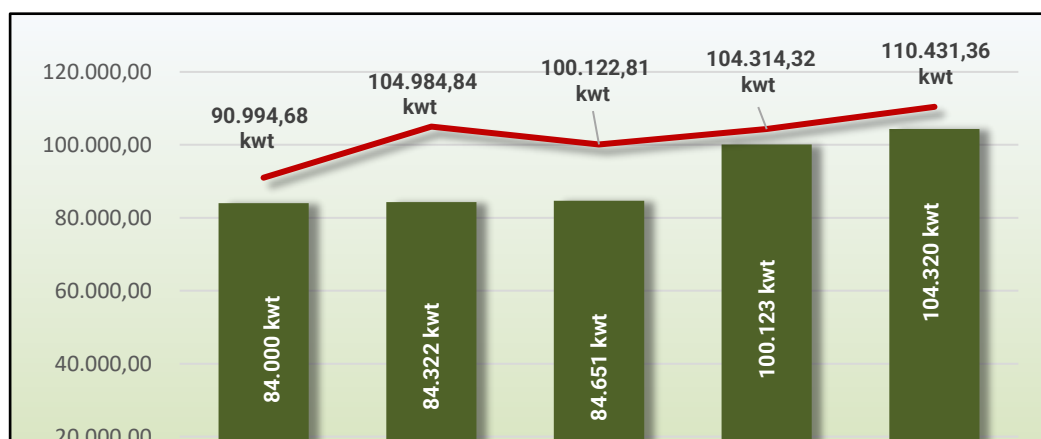
Upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah :

1. Melakukan pendampingan kepada petani tentang manajemen waktu tanam
2. Menambah prasarana pertanian terutama untuk meningkatkan ketersediaan air pada musim kemarau dan pembuangan air saat musim hujan seperti pintu air, pembangunan/rehab JITU, sumur bor.
3. Pelatihan penerapan teknologi pertanian tepat guna (smart agriculture) untuk meningkatkan hasil produksi dan menekan biaya produksi dan peningkatan produktivitas ditengah kondisi iklim yang tidak pasti.
4. Pembinaan dan penumbuhan kelompok petani muda untuk mendorong regenerasi petani dengan memanfaatkan bonus demografi.

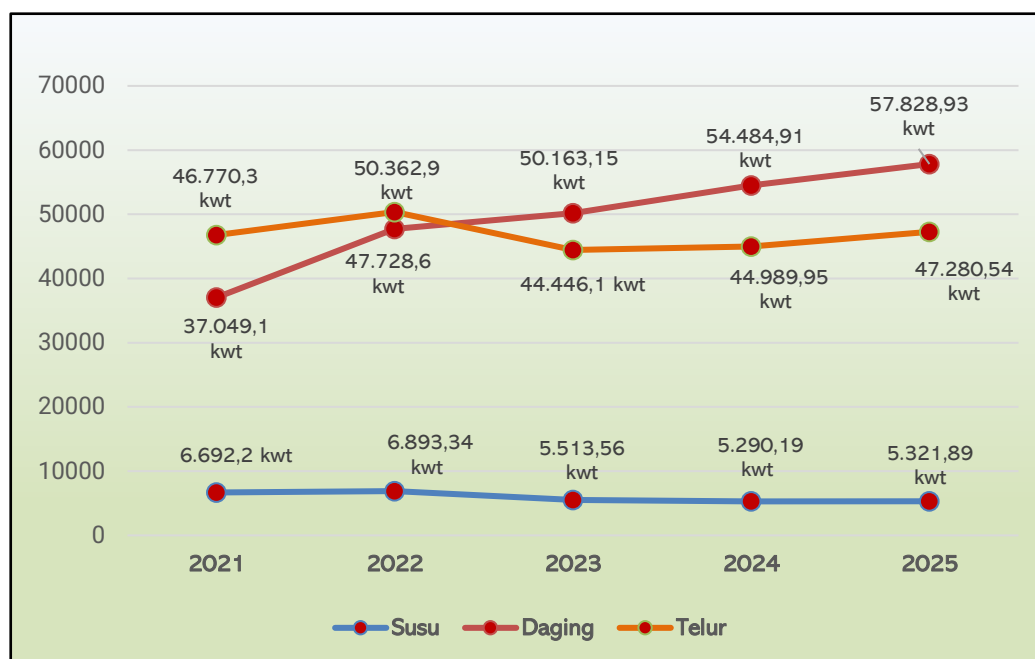
Indikator Kinerja 2 : Produksi hasil peternakan

Sub Sektor Peternakan memiliki peran yang cukup besar dalam mendukung ketersediaan pangan terutama dalam penyediaan pangan yang berasal dari pangan hewani yang terdiri dari daging, susu dan telur. Perkembangan produksi ternak mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik 3.6
Produksi Hasil Peternakan (kwintal) Tahun 2021-2025



Grafik 3.7
Produksi Telur, Daging dan Susu (kwintal) Tahun 2021-2025



Produksi hasil peternakan selama periode 2021-2025 menunjukkan tren yang relatif meningkat, meskipun terjadi fluktuasi pada beberapa komoditas. Secara umum, kinerja subsektor peternakan menunjukkan perbaikan produksi pada komoditas utama, yaitu daging dan telur, sementara produksi susu cenderung stagnan. Setelah mampu pulih pasca pandemi covid tahun 2021, pada tahun 2023 produksi peternakan mengalami penurunan akibat kasus PMK dan LSD yang menyerang pada ternak besar yaitu sapi potong dan sapi perah. Dengan upaya vaksinasi PMK dan LSD secara masif, mulai tahun 2024-2025 produksi hasil peternakan kembali mengalami kenaikan. Pada tahun 2025 produksi hasil peternakan mencapai 110.431,36 kwintal atau sebesar 105,86% dari target sebesar 104.320 kwintal. Produksi hasil peternakan mengalami kenaikan sebesar 5,86% di bandingkan dari tahun tahun 2024.

Pada komoditas daging, produksi mengalami peningkatan signifikan dari 37.049,1 kwintal pada tahun 2021 menjadi 57.828,93 kwintal pada tahun 2025. Sedangkan dibandingkan dengan tahun 2024, produksi daging pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 3.344,02 kwintal atau sebesar 6,14%. Peningkatan ini menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten setiap tahun dan menjadi kontributor utama kenaikan total produksi peternakan.

Komoditas telur menunjukkan fluktuasi. Produksi tahun 2021 sebesar 46.770,3 kwintal, meningkat pada 2022 menjadi 50.362,9 kwintal, kemudian menurun pada 2023 menjadi 44.446,1 kwintal. Produksi kembali meningkat pada 2024-2025 hingga mencapai 47.280,54 kwintal. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, produksi telur pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 2.290,59 kwintal atau sebesar 5,09%. Hal ini menunjukkan adanya ketidakstabilan produksi, dimana pada tahun 2023 terjadi wabah PMK dan LSD yang berdampak sampai dengan tahun 2024. Namun secara umum masih berada pada kisaran yang cukup stabil.

Sementara itu, produksi susu relatif stagnan dengan kecenderungan menurun tipis. Produksi tahun 2021 sebesar 6.692,2 kwintal, meningkat sedikit pada 2022, namun menurun pada 2023–2024 karena wabah LSD dan PMK, namun kembali naik tipis pada 2025 menjadi 5.321,89 kwintal.

Dari sisi target dan realisasi produksi peternakan secara keseluruhan, capaian realisasi setiap tahun umumnya berada di atas target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja produksi peternakan cukup baik dan mampu melampaui perencanaan yang telah disusun.

Sebagai upaya meningkatkan produksi peternakan, pada tahun 2025 telah dilaksanakan pelayanan vaksinasi dan pelayanan terpadu ternak sebagai upaya pengendalian penyakit ternak. Selain itu juga dilaksanakan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pemotongan di RPHR dan RPHU, pelatihan pembuatan pakan mandiri untuk peternak dan sosialisasi kepada pedagang untuk menggunakan jasa RPH dalam pemotongan ternaknya.

Selain dari segi sarana prasarana dan kesehatan hewan ternak, stabilisasi produksi hasil peternakan juga didukung oleh peningkatan kesehatan masyarakat veteriner dan penjaminan kesehatan dan keamanan Bahan Asal Hewan (BAH) serta pembinaan dan pendampingan kelompok ternak. Pada tahun 2025 juga telah dilaksanakan pemberian layanan terpadu kesehatan hewan dengan optimalisasi pelapor kelurahan, pemberian KIE

tentang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, penerapan sertifikasi NKV dan pengujian sampel produk hasil peternakan sebagai jaminan terhadap keamanan produk asal hewan. Selain itu juga dilakukan pemantauan terhadap pengelolaan limbah ternak untuk meminimalisir pencemaran lingkungan.

Faktor pendorong peningkatan produksi hasil peternakan adalah :

1. Meningkatnya kesadaran peternak terhadap kesehatan ternaknya
2. Program vaksinasi gratis untuk pengendalian dan pencegahan penyakit PMK dan LSD.
3. Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) meningkatkan permintaan terhadap produk peternakan terutama daging dan telur, sehingga mendorong peningkatan produksi.

Sedangkan faktor penghambat peningkatan produksi peternakan adalah :

1. Harga pakan yang fluktuatif dan cenderung meningkat karena ketergantungan bahan baku impor (jagung, bungkil kedelai).
2. Masih kurangnya pelaksanaan higiene sanitasi dan biosecurity di tingkat peternak skala kecil.
3. Masih adanya ancaman penyakit menular ternak yang bisa menurunkan produksi seperti LSD, PMK dan Flu Burung.

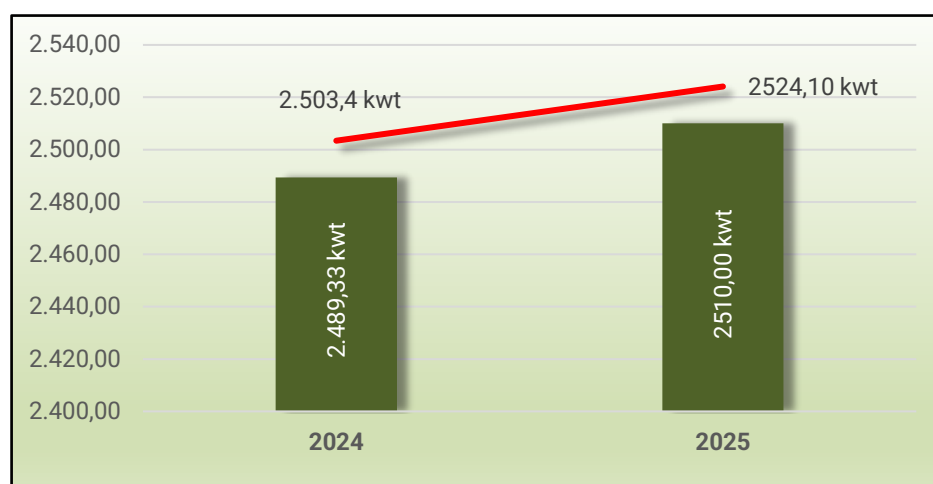
Upaya tidak lanjut yang dapat dilaksanakan adalah :

1. Melaksanakan pelayanan terpadu kesehatan hewan secara berkala.
2. Penyediaan vaksin dan obat-obatan ternak.
3. Pengembangan pakan local berbasis limbah pertanian dan pelatihan formulasi pakan mandiri.
4. Pembinaan higiene sanitasi dan biosekuriti kandang.

Indikator Kinerja 3 : Produksi hasil budidaya ikan konsumsi

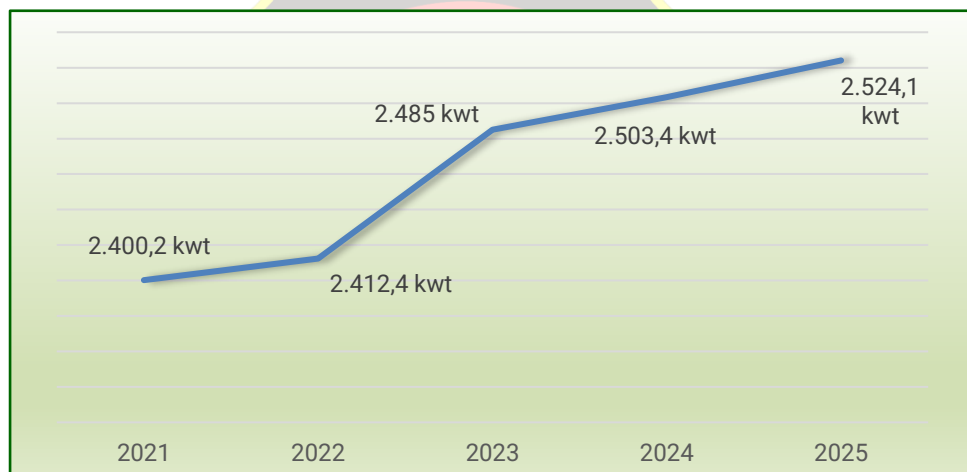
Sektor perikanan merupakan salah satu pendukung perekonomian di Kota Blitar selain sebagai penyedia bahan pangan hewani. Komoditas perikanan yang diusahakan merupakan budidaya ikan konsumsi dan ikan hias. Jumlah produksi ikan konsumsi pada tahun 2024 disajikan pada diagram berikut ini.

Grafik 3.8
Produksi Ikan Konsumsi (Kwintal) Tahun 2024 - 2025



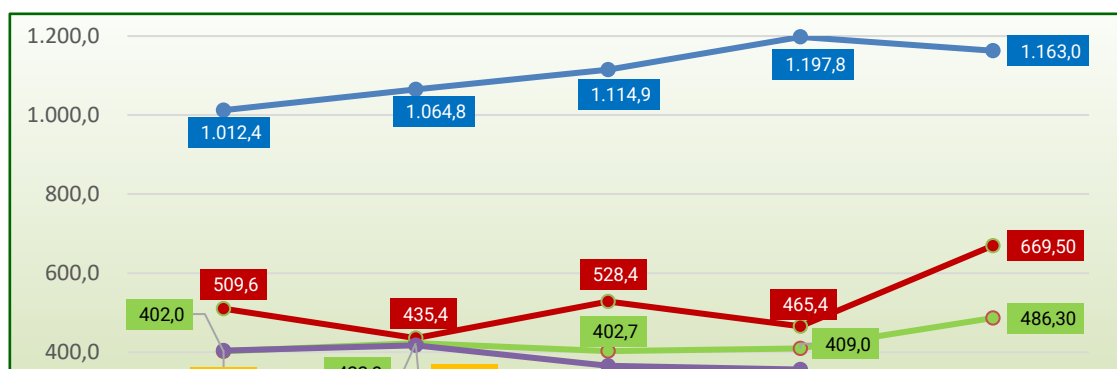
Pada tahun 2025, target produksi sebesar 2.510 kwintal dengan realisasi produksi mencapai 2.524,1 kwintal, sehingga melampaui target sebesar 14,1 kwintal atau tercapai sekitar 100,56%. Dibandingkan tahun 2024, terjadi peningkatan realisasi produksi sebesar 20,7 kwintal atau sekitar 0,83%. Meskipun persentase kenaikan tidak terlalu besar, hal ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan.

Grafik 3.9
Produksi Ikan Konsumsi (Kwintal) Tahun 2021-2025



Berdasarkan data produksi tahun 2021-2025, terlihat adanya tren peningkatan yang cukup stabil dan konsisten. Produksi pada tahun 2021 sebesar 2.400,2 kwintal, kemudian meningkat menjadi 2.412,4 kwintal pada tahun 2022. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan capaian 2.485 kwintal, dan terus meningkat pada tahun 2024 menjadi 2.503,4 kwintal. Pada tahun 2025, produksi kembali mengalami kenaikan menjadi 2.524,1 kwintal, yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Tabel 3.10
Produksi Ikan Konsumsi (Kwintal) Tahun 2021-2025



Komoditas ikan konsumsi yang dibudidayakan di Kota Blitar terdiri dari Lele, Nila, Gurami, Patin dan komoditas lainnya (Gabus, Majalaya, Bawal). Lele merupakan komoditas unggulan yang konsisten mendominasi dengan kontribusi 46,09% pada 2025. Produksi naik stabil dari 1.012,4 kwintal (2021) hingga mencapai puncak 1.197,8 kwintal di 2024, kemudian sedikit melandai menjadi 1.163,0 kwintal di 2025 (-2,9%). Meski demikian, Lele tetap menjadi tulang punggung budidaya ikan konsumsi.

Komoditas Nila menunjukkan kinerja paling dinamis. Setelah fluktuasi di 2022–2024, terjadi lonjakan tajam pada 2025 menjadi 669,5 kwintal (+43,9% dibanding 2024). Kontribusi naik menjadi 26,53% dari total. Ini menjadi pencapaian tertinggi sepanjang periode dan menjadi pendorong utama pertumbuhan total tahun 2025.

Sedangkan untuk komoditas Gurami relatif stabil dengan tren meningkat di akhir periode. Produksi naik dari 402,0 kwintal (2021) menjadi 486,3 kwintal di 2025 (+20,9% dari 2024). Kontribusi 19,27% pada 2025, menunjukkan potensi yang semakin kuat.

Akan tetapi untuk komoditas Patin menunjukkan penurunan terus-menerus dan sangat tajam di 2025, dari 404,0 kwintal (2021) turun menjadi hanya 128,0 kwintal (-64% dari 2024). Kontribusi menyusut drastis menjadi 5,07%. Ini menjadi satu-satunya komoditas yang menunjukkan pelemahan signifikan.

Untuk komoditas lainnya (Gabus, Majalaya, Bawal) sangat stabil dengan pertumbuhan kecil namun konsisten (dari 72,2 menjadi 76,3). Kontribusi tetap rendah (3,02%), tetapi menunjukkan ketahanan yang baik.

Secara keseluruhan, tren produksi selama lima tahun menunjukkan pertumbuhan positif yang berkelanjutan dan relatif stabil, dengan peningkatan rata-rata setiap tahun. Kinerja ini mencerminkan kondisi produksi yang semakin baik serta adanya konsistensi

dalam pengelolaan usaha produksi. Walaupun begitu, setiap tahunnya preferensi jenis ikan konsumsi yang dibudidayakan mengalami perubahan tergantung terhadap permintaan pasar.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi ikan konsumsi pada tahun 2025 adalah pembinaan, pendampingan dan pelatihan serta pengawasan kesehatan ikan dan lingkungan (keskanling) kepada pembudidaya di Kota Blitar. Pembudidaya ikan di Kota Blitar pada tahun 2025 sejumlah 556 orang dan sebanyak 76,43% telah mendapatkan pelatihan/pendampingan. Pelatihan yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah pelatihan pembenihan ikan air tawar (Nila) untuk 5 kelompok pembudidaya ikan sebagai upaya untuk peningkatan penyediaan benih ikan berkualitas. Selain itu juga dilaksanakan pembinaan teknis manajemen budidaya perikanan (CPIB dan CBIB) kepada 50 orang pembudidaya ikan di Kota Blitar. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produksi perikanan sehingga mampu memberikan nilai tambah perekonomian bagi pembudiaya.

Dalam peningkatan produksi ikan konsumsi ada beberapa faktor yang bisa menjadi pendorong yaitu :

1. Penerapan manajemen budidaya dan pemeliharaan (CPIB, CBIB) yang lebih baik oleh pelaku usaha berkontribusi pada peningkatan produktivitas.
2. Program bantuan sarana prasarana yang berasal dari APBD Propinsi maupaun APBN.
3. Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) meningkatkan permintaan produk perikanan segar yang mendorong peningkatan produksi.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam peningkatan produksi ikan konsumsi adalah :

1. Ketersediaan benih ikan yang berkualitas belum optimal.
2. Harga pakan ikan yang cenderung meningkat.
3. Masih banyaknya pembudidaya perikanan yang belum memiliki sertifikat standar mutu.

Upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah :

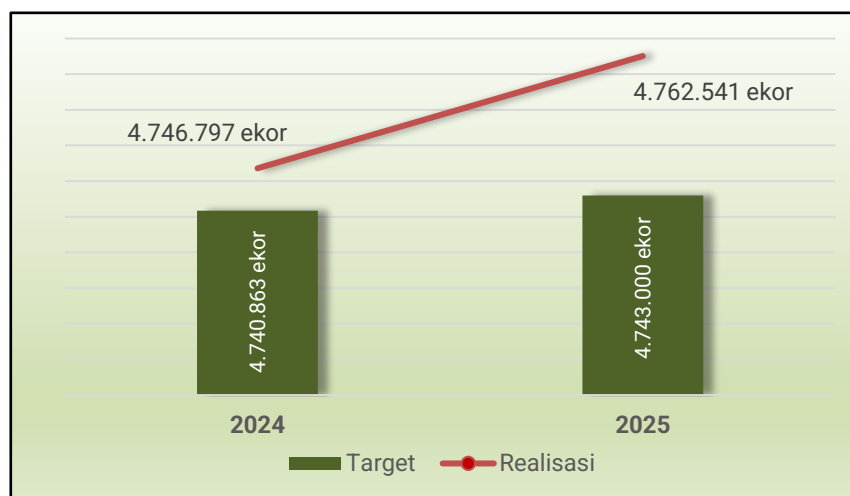
1. Pelaksanaan pelayanan pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan (Keskanling) dilaksanakan secara berkala.
2. Pelatihan dan pembinaan kepada kelompok perikanan tentang standar mutu baik untuk peningkatan produktivitas kolam maupun kualitas benih yang dihasilkan.
3. Peningkatan kapasitas dan kualitas UPT PBAT sebagai salah satu penyedia benih ikan konsumsi.

4. Pelatihan pembuatan pakan mandiri.

Indikator Kinerja 2 : Produksi hasil budidaya ikan hias

Kota Blitar dikenal sebagai penghasil ikan hias terutama ikan koi. Selain Ikan Koi sebagai komoditas utama, ada beberapa jenis ikan hias lainnya yang dibudidayakan di Kota Blitar. Budidaya ikan hias mampu memberikan kontribusi yang bagus untuk pergerakan perekonomian di Kota Blitar. Produksi ikan hias tahun 2024-2025 disajikan pada grafik berikut.

Grafik 3.11
Produksi Ikan Hias (Ekor) Tahun 2024-2025



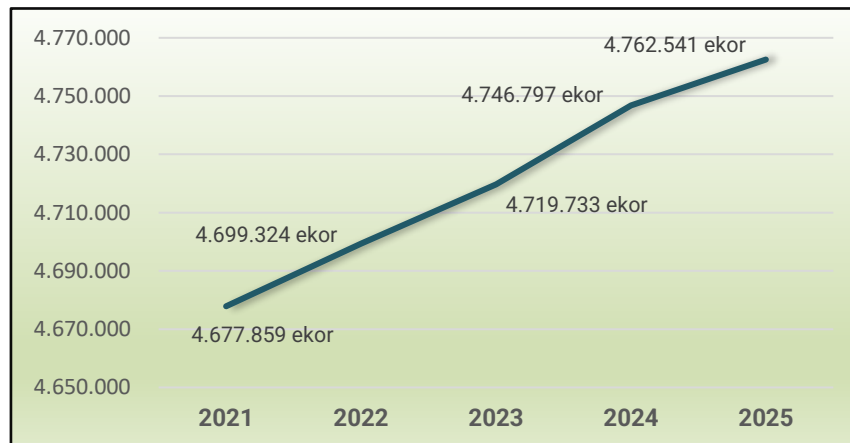
Produksi ikan hias pada tahun 2024–2025 menunjukkan kinerja yang positif dengan tren peningkatan baik dari sisi target maupun realisasi. Hal ini mencerminkan bahwa subsektor perikanan hias masih memiliki potensi yang kuat dan terus berkembang sebagai salah satu komoditas bernilai ekonomi tinggi.

Pada tahun 2025, target produksi kembali meningkat menjadi 4.743.000 ekor. Realisasi produksi mencapai 4.762.541 ekor, sehingga melampaui target sebesar 19.541 ekor atau sekitar 100,41%. Dibandingkan tahun 2024, realisasi produksi tahun 2025 meningkat sebesar 15.744 ekor atau sekitar 0,33%. Meskipun peningkatannya tidak terlalu besar, hal ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan konsisten.

Secara komparatif, baik target maupun realisasi produksi ikan hias pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024. Peningkatan target mencerminkan adanya optimisme terhadap potensi produksi, sementara realisasi yang melampaui target menunjukkan efektivitas pembinaan dan pengembangan usaha budidaya ikan hias. Dalam konteks pengembangan perikanan budidaya di Indonesia,

stabilitas dan peningkatan produksi ikan hias ini menjadi indikator positif bagi penguatan ekonomi sektor perikanan, khususnya pada usaha budidaya skala kecil dan menengah.

Grafik 3.12
Produksi Ikan Hias (Ekor) Tahun 2021-2025



Produksi ikan hias selama periode 2021–2025 menunjukkan peningkatan yang stabil dan konsisten. Data tersebut menggambarkan bahwa subsektor perikanan budidaya ikan hias memiliki perkembangan yang positif dan berkelanjutan, baik dari sisi kapasitas produksi maupun pengelolaan usaha. Pada tahun 2021, produksi ikan hias tercatat sebesar 4.677.859 ekor. Produksi kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 4.699.324 ekor, atau naik sekitar 0,46%. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2023 dengan capaian 4.719.733 ekor atau tumbuh sekitar 0,43% dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini berlanjut pada tahun 2024 dengan produksi mencapai 4.746.797 ekor, meningkat sekitar 0,57% dari tahun 2023. Pada tahun 2025, produksi ikan hias mencapai 4.762.541 ekor, meningkat sebesar 15.744 ekor atau sekitar 0,33% dibanding tahun 2024. Capaian ini merupakan produksi tertinggi dalam lima tahun terakhir dan menunjukkan bahwa sektor budidaya ikan hias mampu mempertahankan pertumbuhan meskipun dalam persentase yang relatif moderat.

Secara keseluruhan, selama kurun waktu lima tahun terjadi peningkatan produksi sebesar 84.682 ekor atau sekitar 1,81% dari tahun 2021 ke 2025. Pola pertumbuhan yang stabil ini mengindikasikan adanya konsistensi dalam kegiatan budidaya, dukungan sarana produksi, serta terjaganya permintaan pasar terhadap ikan hias.

Tabel 3.3
Produksi Ikan Hias Menurut Jenisnya (Ekor) Tahun 2021-2025

Tahun	Jenis	Jumlah
-------	-------	--------

	Koi	Manvis	Sepat	Cupang	Lainnya (Guppy, Goldenblack, Chana, Mas Koki)	
2021	1.744.904 ekor	1.003.971 ekor	748.030 ekor	110.276 ekor	70.678 ekor	3.677.859 ekor
2022	1.940.777 ekor	992.487 ekor	737.891 ekor	957.195 ekor	70.974 ekor	4.699.324 ekor
2023	1.818.598 ekor	987.404 ekor	720.021 ekor	1.122.807 ekor	70.903 ekor	4.719.733 ekor
2024	1.764.400 ekor	855.819 ekor	885.554 ekor	1.169.740 ekor	71.284 ekor	4.746.797 ekor
2025	1.913.018 ekor	1.057.257 ekor	939.872 ekor	780.924 ekor	71.470 ekor	4.762.541 ekor

Komoditas ikan hias yang dibudidayakan paling banyak selain ikan koi, adalah ikan manvis, cupang, sepat dan sebagainya kecil dari jenis guppy, goldenblack, chana dan mas koki. Seperti pada budidaya ikan konsumsi, preferensi jenis ikan pada budidaya ikan hias sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar. Selama 5 tahun, Koi merupakan komoditas andalan yang merupakan penyumbang terbesar dalam produksi ikan di Kota Blitar. Produksi sepat turun 2023–2024, namun bangkit kuat di 2025 menjadi 1.913.018 ekor (+8,43% dari 2024) dengan kontribusi 40,17%. Puncak kontribusi 41,30% terjadi di 2022. Untuk komoditas Manvis mengalami penurunan hingga 2024 (18,03%), namun mengalami lonjakan signifikan di 2025 menjadi 1.057.257 ekor (+23,54%) dan kontribusi naik ke 22,20%. Komoditas Sepat menunjukkan tren positif konsisten. Kontribusinya naik dari 15,26% (2023) menjadi 19,73% di 2025 (939.872 ekor), menunjukkan potensi besar sebagai komoditas pendukung. Cupang merupakan komoditas yang paling dinamis. Cupang mencapai puncak produksi sebesar 1.169.740 ekor (24,64%) di 2024, namun turun tajam 33,24% di 2025 menjadi 780.924 ekor (16,40%). Sedangkan untuk komoditas lainnya (Guppy, Goldenblack, Chana, Mas Koki), menunjukkan tren sangat stabil di kisaran 70.000–71.500 ekor setiap tahun (kontribusi konsisten 1,50–1,51%).

Keberhasilan peningkatan produksi ikan hias dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya minat masyarakat terhadap ikan hias, berkembangnya pasar lokal maupun daring, serta dukungan pembinaan teknis kepada pembudidaya. Selain itu, penggunaan teknologi budidaya yang semakin baik dan efisien turut menjaga stabilitas produksi.

Jumlah pembudidaya ikan hias di Kota Blitar sebanyak 98 pembudidaya. Selain pembinaan dan pendampingan secara rutin kepada pembudidaya ikan hias, untuk meningkatkan produksi dan jangkauan pemasaran, pada tahun 2025 juga dilaksanakan promosi ikan hias yang dikemas dalam bentuk kontes dan lelang Ikan hias Kota Blitar yang

dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pengiat dan komunitas ikan hias di Kota Blitar (Blitar Koi Show).

Dalam peningkatan produksi ikan hias ada beberapa faktor yang bisa menjadi pendorong yaitu :

1. Antusiasme pembudidaya ikan terhadap perkembangan teknologi budidaya ikan hias.
2. Adanya bantuan sarana prasarana yang berasal dari APBD Propinsi maupaun APBN.
3. Tersedianya fasilitasi promosi melalui even kontes dan bursa untuk memperluas jangkauan pemasaran.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam peningkatan produksi ikan hias adalah :

1. Fluktuasi permintaan komoditas tertentu.
2. Keterbatasan lahan dan sumber air bersih.
3. Masih banyaknya pembudidaya perikanan yang belum memiliki sertifikat standar mutu.
4. Harga pakan dan input produksi yang fluktuatif serta dampak perubahan iklim (suhu air ekstrem).
5. Masih terbatasnya jangkauan pemasaran terutama untuk jenis selain koi.

Upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah :

1. Harga pakan dan input produksi yang fluktuatif serta dampak perubahan iklim (suhu air ekstrem).
2. Pelaksanaan pelayanan pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan (Keskanling) harus dilaksanakan secara berkala.
3. Pelatihan dan pembinaan kepada kelompok perikanan tentang standar mutu baik untuk peningkatan produktivitas kolam maupun kualitas benih yang dihasilkan.
4. Peningkatan jangkauan pemasaran dengan meningkatkan kuantitas, kualitas dan kapasitas even kontes/bursa yang dilaksanakan serta penyediaan portal digital agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.

A.1.3 Meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan

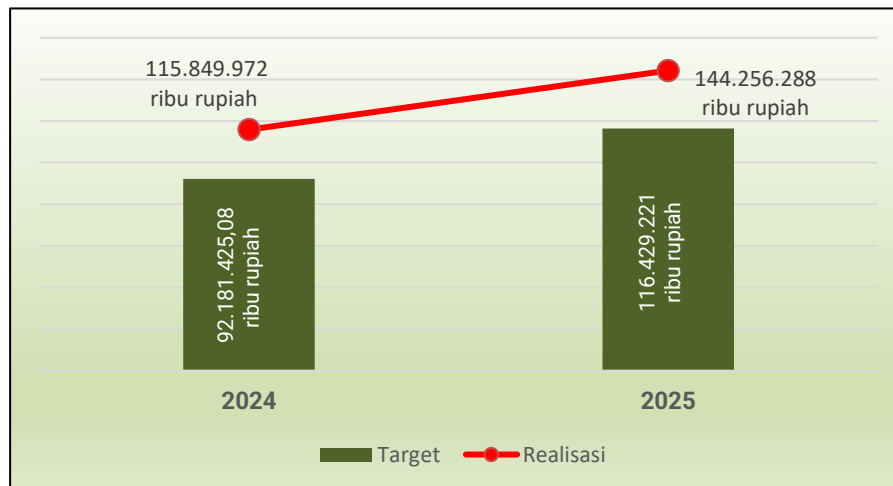
Indikator Kinerja 1 : Nilai produksi hasil pertanian

Nilai produksi hasil pertanian mengacu pada total nilai ekonomi dari produk pertanian yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu. Nilai ini biasanya dihitung berdasarkan volume produksi dikalikan dengan harga jual produk ditingkat produsen. Nilai produksi hasil pertanian baru dihitung pada tahun 2024 dan merupakan indikator kinerja

baru yang tertuang dalam Perubahan Ketiga Renstra Tahun 2021-2026. Target dan capaian nilai produksi hasil pertanian disajikan pada grafik berikut ini.

Grafik 3.12

Target dan Realisasi Nilai Produksi Pertanian Tahun 2024-2025



Berdasarkan data grafik yang disajikan, nilai produksi hasil pertanian mencatat kinerja sangat gemilang selama periode 2024–2025. Realisasi nilai produksi secara konsisten jauh melampaui target dengan margin yang lebar, menunjukkan peningkatan nilai tambah yang signifikan meskipun volume produksi secara nasional relatif stabil. Pada tahun 2025 nilai produksi pertanian sebesar 144.256.288 ribu rupiah mencapai 123,90% dari target yang telah ditetapkan. Pertumbuhan nilai produksi dari 2024 ke 2025 sebesar +28,41 miliar rupiah atau +24,52%. Peningkatan nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan volume rata-rata sektor pertanian, mengindikasikan kenaikan harga komoditas dan/atau peningkatan kualitas produk yang sangat kuat (rata-rata nilai per satuan produksi naik sekitar 24%). Kenaikan ini sangat erat kaitannya dengan kebijakan penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan jagung yang ditetapkan pemerintah akhir 2024 dan berlaku efektif awal 2025.

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog secara resmi menaikkan HPP sebagai instrumen perlindungan petani dan percepatan swasembada pangan dimana Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani dari Rp6.000/kg (2024) naik menjadi Rp6.500/kg (+8,33%) dan berlaku efektif 15 Januari 2025 (Kepbadan Nomor 2 Tahun 2025 & Nomor 14 Tahun 2025). Untuk Jagung Pipilan Kering di tingkat petani dari Rp5.000/kg (2024) naik menjadi Rp5.500/kg (+10%) dan berlaku sepanjang tahun 2025 (Kepbadan Nomor 18 Tahun 2025 & Nomor 216 Tahun 2025). Selain itu Bulog

wajib menyerap gabah dan jagung sesuai HPP ini, sehingga menciptakan harga lantai (*floor price*) yang stabil di tingkat petani.

Gabah dan jagung merupakan dua komoditas terbesar dalam subsektor tanaman pangan (kontribusi gabah/beras sekitar 50–60% dan jagung sekitar 15–20% dari total nilai produksi tanaman pangan). Kenaikan HPP sebesar 8,33–10% langsung menaikkan harga rata-rata penerimaan petani. Karena Bulog aktif menyerap dengan harga baru, harga pasar di sentra produksi tidak jatuh di bawah HPP, sehingga seluruh volume produksi terjual dengan harga yang lebih tinggi. Akibatnya, meskipun volume produksi hanya naik moderat, nilai produksi melonjak tajam.

Selain itu adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendorong meningkatnya permintaan produk hasil pertanian terutama beras dan sayur-sayuran. Program ini bukan hanya program sosial gizi, melainkan mesin penggerak ekonomi pertanian yang menciptakan demand side yang sangat kuat. Kombinasi antara permintaan MBG yang masif ditambah HPP yang protektif dan penyerapan lokal telah berhasil mendorong petani meningkatkan produksi dan pendapatan secara simultan.

Beberapa faktor yang bisa menjadi pendorong peningkatan nilai produksi pertanian yaitu :

1. Kenaikan harga pokok produksi (HPP) padi dan jagung.
2. Inovasi produksi padi sehat yang dikelola secara menyeluruh oleh kelompok tani.
3. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menaikkan jumlah permintaan produk hasil pertanian.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat peningkatan nilai produksi pertanian adalah :

1. Masih kurangnya diversifikasi produk sehingga sangat tergantung pada produksi tanaman pangan.
2. Perubahan iklim dan cuaca ekstrem (kekeringan, banjir, El Niño/La Niña) mempengaruhi produktivitas tanaman.
3. Kenaikan biaya input produksi (pupuk, pestisida dan tenaga kerja) yang dapat menekan margin keuntungan petani.

Upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah :

1. Peningkatan diversifikasi produk melalui penerapan urban farming dan pemanfaatan lahan kosong untuk komoditas selain tanaman pangan.

2. Peningkatan nilai tambah terhadap produk hasil pertanian melalui pelatihan teknologi/inovasi, pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani binaan.
3. Peningkatan jangkauan pemasaran dengan memanfaatkan teknologi komunikasi maupun fasilitasi dalam pameran serta lembaga perekonomian desa (Koperasi Merah Putih).

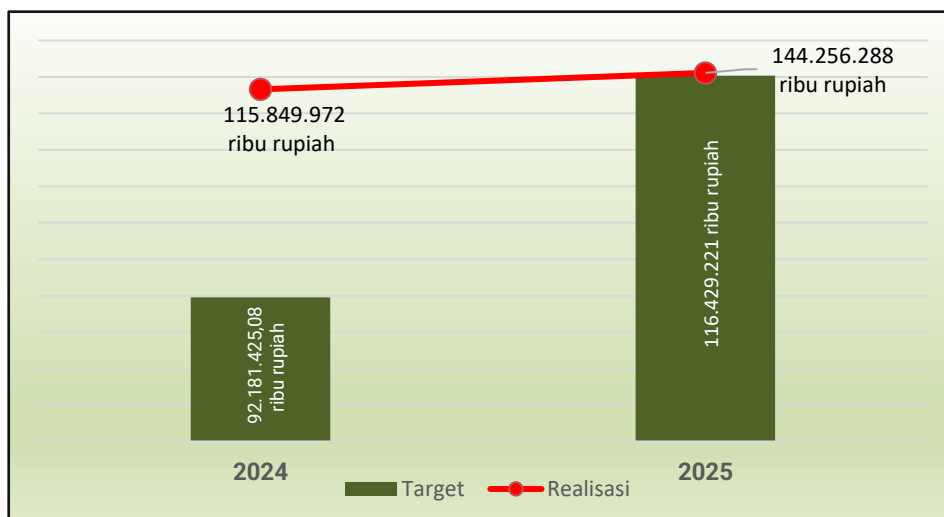
Indikator Kinerja 2 : Nilai produksi hasil perikanan

Nilai produksi hasil pertanian mengacu pada total nilai ekonomi dari produk perikanan yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu mencakup produksi ikan segar, ikan hias dan olahan hasil perikanan. Nilai ini biasanya dihitung berdasarkan volume produksi dikalikan dengan harga jual produk ditingkat produsen. Nilai produksi hasil perikanan baru dihitung pada tahun 2024 dan merupakan indikator kinerja baru yang tertuang dalam Perubahan Ketiga Renstra Tahun 2021-2026. Target dan capaian nilai produksi hasil perikanan disajikan pada grafik berikut ini.



Grafik 3.13

Target dan Realisasi Nilai Produksi Perikanan Tahun 2024-2025

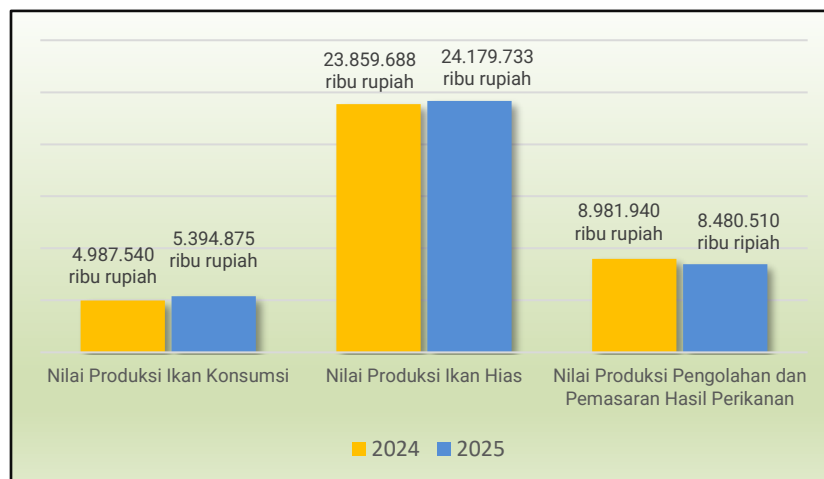


Berdasarkan data grafik yang disajikan, nilai produksi hasil perikanan mencatat kinerja luar biasa pada periode 2024–2025. Realisasi nilai produksi secara konsisten jauh melampaui target dengan margin yang lebar, meskipun volume produksi hanya meningkat moderat. Hal ini menunjukkan peningkatan nilai tambah yang sangat signifikan per kilogram ikan yang dihasilkan. Pada tahun 2025 nilai produksi perikanan sebesar 144.256.288 ribu rupiah mencapai 100,10 % dari target yang telah ditetapkan. Pertumbuhan nilai produksi dari 2024 ke 2025 sebesar +0,23 miliar rupiah atau +0,61% (sangat stabil). Pada 2024 terjadi lonjakan nilai yang signifikan (+8,15% di atas target), sedangkan 2025 lebih merupakan periode konsolidasi dengan capaian hampir tepat sasaran. Nilai produksi didapat dari nilai produksi ikan segar, ikan hias dan pengolahan/pemasaran hasil perikanan.



Grafik 3.18

Nilai Produksi Perikanan Ikan Konsumsi, Ikan Hias dan Pengolahan/Pemasaran Hasil Perikanan Tahun 2024-2025



Berdasarkan grafik nilai produksi perikanan yang disajikan, sektor perikanan di Kota Blitar menunjukkan performa positif pada 2025 dibandingkan 2024, dengan pola yang berbeda antar subsektor. Total nilai produksi keseluruhan (seperti yang tercermin dari grafik sebelumnya sekitar Rp144 miliar untuk konsumsi, hias, pengolahan) didorong terutama oleh subsektor ikan konsumsi dan ikan hias, sementara subsektor pengolahan dan pemasaran mengalami sedikit penurunan.

Nilai produksi hasil perikanan tahun 2025 paling besar berasal dari nilai produksi ikan hias sebesar 24.179.733 ribu rupiah atau sebesar 63,92% dari jumlah keseluruhan nilai produksi perikanan. Sedangkan nilai produksi pengolahan dan pemasaran menyumbang sebesar 22,42% dan nilai produksi ikan konsumsi sebesar 14,26%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai produksi perikanan di Kota Blitar sangat tergantung pada sektor ikan hias. Selain dikarenakan ikan hias memiliki nilai jual yang lebih tinggi, hal ini juga dipengaruhi oleh adanya komunitas atau asosiasi (Blitar Koi Club, dll) sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan akses pasar. Sedangkan untuk pengolahan dan pemasaran hasil perikanan didapat dari omset penjualan kelompok pengolah dan pemasar (Poklasar) yang sangat tergantung pada kuantitas, kualitas dan diversifikasi produk yang dipasarkan.

Beberapa faktor yang menjadi pendorong peningkatan nilai produksi pertanian yaitu :

1. Kota Blitar sudah dikenal sebagai penghasil Ikan Koi berkualitas
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan untuk memenuhi kebutuhan energi dan gizi.
3. Meningkatnya permintaan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Beberapa faktor yang menjadi penghambat peningkatan nilai produksi perikanan adalah :

1. Masih kurangnya diversifikasi produk yang diproduksi oleh pelaku usaha olahan hasil perikanan sehingga kurang bisa memenuhi permintaan pasar dan masih didominasi oleh produksi dari luar.
2. Belum optimalnya jangkauan pemasaran baik untuk konsumsi, ikan hias maupun olahan hasil perikanan.

Upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah :

1. Peningkatan diversifikasi produk melalui pelatihan olahan hasil perikanan kepada poklasar.

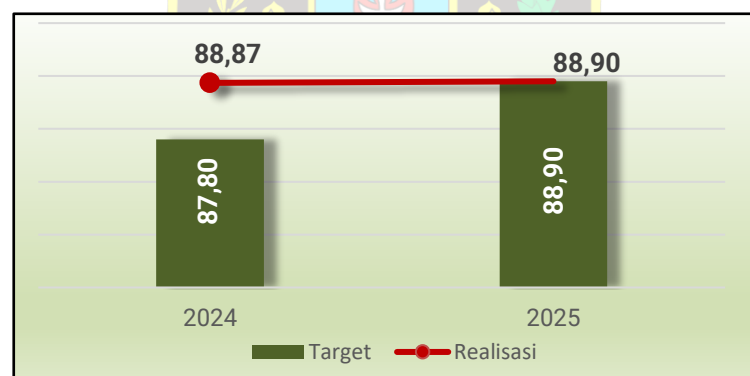
2. Peningkatan jangkauan pemasaran dengan memanfaatkan teknologi komunikasi maupun fasilitasi dalam pameran serta fasilitasi terhadap komunitas/asosiasi ikan hias.
3. Melakukan kontrak langsung antara kelompok pembudidaya dengan dapur MBG untuk menjamin serapan minimal 70% produksi lokal.

A.1.4. Tercukupinya Konsumsi Pangan Masyarakat

Indikator Kinerja : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

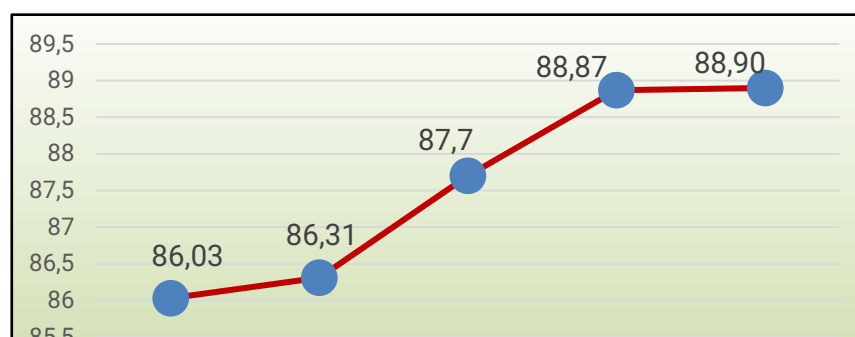
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi merupakan indikator mutu gizi dan keberagaman konsumsi pangan. Dengan pendekatan PPH, perencanaan penyediaan dan konsumsi pangan penduduk tidak hanya untuk dapat memenuhi kecukupan gizi (*Nutritional Adequacy*), tetapi sekaligus mempertimbangkan keseimbangan gizi (*Nutritional Balance*) yang didukung oleh cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kuantitas dan kemampuan daya beli (*affordability*). Semakin tinggi nilai Skor PPH Konsumsi menunjukkan situasi konsumsi pangan yang semakin beragam, seimbang dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya.

Grafik 3.19
Skor PPH Konsumsi Tahun 2024-2025



Skor PPH konsumsi mengalami peningkatan dari 87,80 pada tahun 2024 menjadi 88,90 pada tahun 2025 atau meningkat sebesar 0,03 point. Realisasi Skor PPH Tahun 2025 mencapai 100% dari target sebesar 88,90 dengan kategori Sangat Berhasil. Hal ini juga menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan masyarakat meningkat dibandingkan pada Tahun 2024. Penghitungan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dilakukan melalui pendekatan analisis konsumsi pangan. Analisis konsumsi pangan dilakukan melalui survey konsumsi pangan di 21 kelurahan untuk mengetahui pola konsumsi dan tingkat konsumsi energi masyarakat.

Grafik 3.20
Tren PPH Konsumsi Tahun 2021-2025



Perkembangan Skor PPH Konsumsi mulai tahun 2021-2025 menunjukkan tren yang positif. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi pola konsumsi pangan masyarakat setiap tahunnya terus meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Tabel. 3.4
Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Kota Blitar
Tahun 2025

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/ Kapita/ Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/ Kapita	% Aktual	% AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	332.5	1,291	59.8	60.1	0.5	29.9	30.0	25.0	25.0
2	Umbi-umbian umbian	91.5	98	4.5	4.5	0.5	2.3	2.3	2.5	2.3
3	Pangan Hewani	144.0	315	14.6	14.6	2.0	29.1	29.3	24.0	24.0
4	Minyak dan Lemak Lemak	5.9	53	2.5	2.5	0.5	1.2	1.2	5.0	1.2
5	Buah/Biji Berminyak	2.7	14	0.7	0.7	0.5	0.3	0.3	1.0	0.3
6	Kacang-kacangan	47.2	131	6.1	6.1	2.0	12.1	12.2	10.0	10.0
7	Gula	25.2	92	4.3	4.3	0.5	2.1	2.1	2.5	2.1
8	Sayur dan Buah	251.6	103	4.8	4.8	5.0	23.8	24.0	30.0	24.0
9	Lain-lain	45.0	63	2.9	2.9	-	-	-	-	-
	Total		2,16	100.0	100.5		100.9	101.4	100.0	88.9

Sumber : Laporan Analisis Konsumsi Pangan Tahun 2025 (AKE : 2150 kkal/kap/hari)

Keterangan:

(+) adalah kelompok bahan makanan yang mencapai skor PPH maksimum

(-) adalah kelompok bahan makanan yang belum mencapai skor PPH maksimum

Berdasarkan hasil analisis konsumsi pangan tahun 2025 didapatkan hasil bahwa konsumsi kelompok padi-padian mencapai skor 30 dari skor maksimal 25,0 dengan konsumsi energi sebesar 1.291 kkal/kapita/hari dimana 83,05 % nya berasal dari beras. Konsumsi beras mengalami penurunan sebesar 9,21% dari 1118,56 kkal/kapita/hari pada tahun 2024 menjadi 1015,5 kkal/kapita/hari di tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa berkurangnya preferensi beras sebagai sumber kalori utama, walaupun masih cukup

tinggi, akan tetapi sudah menunjukkan hasil yang positif. Oleh karenanya pelatihan diversifikasi pangan dan sosialisasi pola pangan seimbang (B2SAH) harus terus dilaksanakan dengan sasaran yang lebih beragam.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja Skor PPH adalah :

3. Peningkatan kualitas konsumsi pangan melalui pembinaan KWT pengelola P2L, pemberian bahan makanan tambahan untuk balita gizi kurang, pelatihan diversifikasi pangan untuk pemenuhan pangan yang Beragam Bergizi Sehat Aman dan Halal (B2SAH).
4. Pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 Kota Blitar mendapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Badan Pangan Nasional berupa Bantuan Pangan Beras (BPB) dan Bantuan Keluarga Resiko Stunting (KRS).
5. Posisi Kota Blitar sebagai kota perdagangan turut memberikan keuntungan dengan adanya perdagangan antar wilayah sekitar (Kab. Blitar, Kab. Tulungagung) sehingga ketersediaan pangan cukup untuk masyarakat Kota Blitar.

Faktor penghambat dalam pencapaian sasaran tercukupinya konsumsi pangan masyarakat adalah :

1. Pola makan masyarakat masih didominasi karbohidrat sederhana, kurang variasi lemak sehat.
2. Pada tahun 2025 masih terjadi Inflasi yang menyebabkan kenaikan harga bahan pangan pokok (beras, telur, daging, cabe) sehingga pengeluaran pangan lebih untuk pemenuhan bahan pangan pokok yaitu beras.

Beberapa upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah :

1. Melaksanakan sosialisasi pola pangan B2SAH, Promosi Gemarikan pada usia anak sekolah (SD) untuk meningkatkan konsumsi ikan serta Pemberian bantuan PMT untuk balita rawan stunting dan masyarakat rentan rawan pangan.
2. Pemantauan harga pangan setiap hari dan gerakan pemanfaatan lahan kosong melalui urban farming dengan memberdayakan KWT dan PKK.

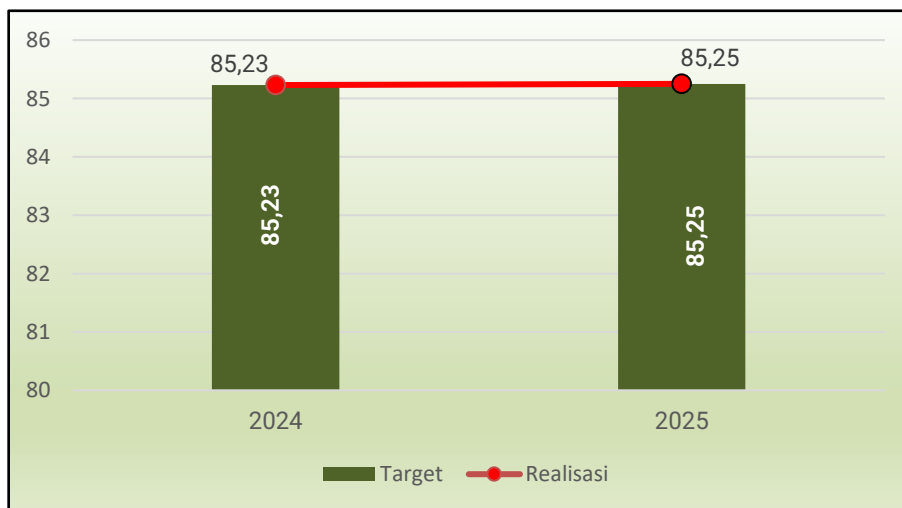
A.1.5 Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan

peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP adalah integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan akuntabilitas keuangan.

Grafik. 3.21
Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar
Tahun 2024-2025



Hasil evaluasi dari implementasi SAKIP Tahun 2025 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mendapatkan peringkat A (memuaskan) dengan nilai 85,25 atau sebesar 100,00% dari target yang telah ditetapkan dengan kategori Sangat Berhasil. Angka ini mengalami kenaikan dari capaian tahun sebelumnya yaitu 85,23.

Dari hasil evaluasi didapatkan bahwa nilai perencanaan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar mengalami penurunan dari 27,11 % menjadi 25,63%. Penurunan ini disebabkan karena capaian ini dikarenakan belum terdapat rekomendasi atau rencana perbaikan dalam evaluasi rencana aksi sehingga proses evaluasi hanya menghasilkan deskripsi capaian tanpa mengidentifikasi akar masalah dan langkah korektif sehingga belum sesuai dengan penerapan prinsip *continuous improvement* dalam manajemen kinerja. Selain itu dokumen renstra yang telah direview belum menunjukkan upaya perbaikan yang memuat inovasi program/kegiatan yang direncanakan.

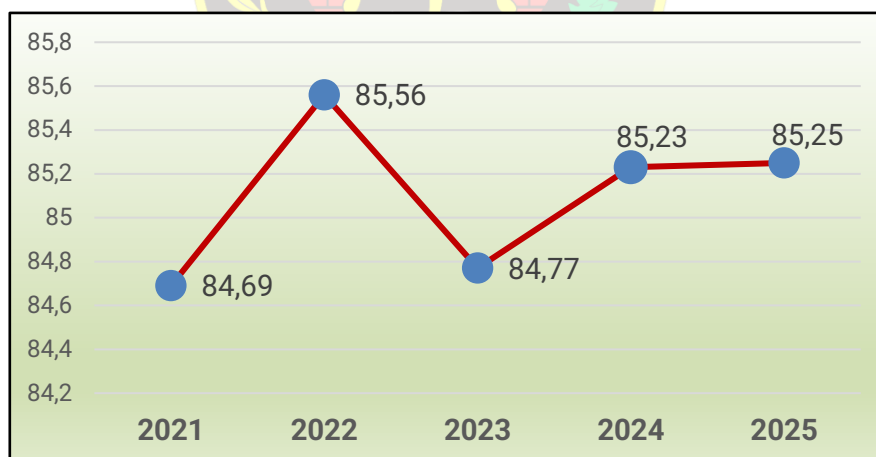
Sedangkan dalam aspek pengukuran kinerja mengalami kenaikan dari 22,89% menjadi 24,27%. Pengukuran kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah dilaksanakan secara periodik dan berjenjang. Selain itu pengukuran capaian kinerja telah didukung dengan data kinerja yang cukup relevan, telah memanfaatkan teknologi informasi (A-SAKIP) untuk pengukuran kinerja tribulanan, telah dilengkapi dengan definisi operasional indikator kinerja, SOP dan telah menerapkan ketercapaian pengukuran kinerja dalam

aplikasi e-Kinerja sebagai dasar dalam pemberian TPP. Selain itu hasil pengukuran kinerja tahunan telah diselaraskan dengan langkah perbaikan dan telah dimuat dalam kebijakan.

Untuk aspek pelaporan kinerja juga mengalami kenaikan dari 14,61% pada tahun 2024 menjadi 14,48% pada tahun 2025. Dalam aspek pelaporan kinerja, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah menyusun dokumen laporan kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah dipublikasikan tepat waktu melalui website. Laporan kinerja telah dimanfaatkan secara optimal dalam perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategi pelaksanaannya. Selain itu informasi kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja menjadi perhatian pimpinan dan dimanfaatkan dalam perbaikan dan penyempurnaan kinerja pada kinerja berikutnya.

Untuk aspek Evaluasi Internal mengalami peningkatan dari 20,63% pada tahun 2024 menjadi 21,88% pada tahun 2024. Evaluasi internal pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah dilaksanakan dengan SDM yang memadai akan tetapi hasilnya belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta efektivitas dan efisiensi kinerja. Sehingga kedepan perlu dilaksanakan sosialisasi tentang hasil evaluasi kinerja dan melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kinerja untuk masing-masing penanggungjawab kinerja individu maupun organisasi.

Grafik 3.22
Perkembangan Nilai SAKIP Tahun 2021-2025



Perkembangan nilai Sakip Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mulai tahun 2021-2025 menunjukkan tren yang fluktuatif. Nilai Sakip Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sempat mengalami penurunan pada tahun 2023 akan tetapi dengan langkah perbaikan yang telah dilaksanakan nilai sakip Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kembali naik pada tahun 2024-2025. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa langkah

perbaikan yang telah dilaksanakan mampu memberikan efek positif terhadap penerapan Sakip di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar.

Faktor pendorong implementasi SAKIP di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah :

1. Seluruh pegawai telah menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan berkomitmen dalam pencapaiannya.
2. Telah dilakukan review dokumen perencanaan secara berkala.
3. Pengukuran kinerja sudah didukung dengan data yang relevan.
4. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala dan memanfaatkan teknologi informasi (ASAKIP).

Sedangkan faktor penghambatnya adalah :

1. Hasil evaluasi internal belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
2. Masih terdapat pegawai yang belum sepenuhnya peduli dengan hasil laporan kinerja.
3. Pengumpulan data dukung kinerja belum memanfaatkan teknologi aplikasi (aplikasi).

Upaya tindak lanjut yang harus dilakukan adalah :

1. Melaksanakan monev kinerja secara berkala dan internalisasi laporan kinerja.
2. Optimalisasi aplikasi data yang dimiliki (SIPETANI) untuk pengumpulan data kinerja.

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025

Tabel. 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023	2024	2024
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	213,52 milyar rupiah	200,43 milyar rupiah	214,73 milyar rupiah
Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	240.477kwintal	173.776,40 kwintal	205.496,40 kwintal
	Jumlah produksi hasil peternakan	100.122,81 kwintal	104.314,32 kwintal	110.431,36 kwintal
	Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi	2.485,00 kwintal	2.503,40 kwintal	2.524,1 kwintal
	Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias	4.719.733 ekor	4.742.797 ekor	4.762.541 ekor
Meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan	Nilai produksi hasil pertanian	-	115.849.972 ribu rupiah	144.256.288 ribu rupiah
	Nilai produksi hasil perikanan	-	37.829.168 ribu rupiah	38.055.118 ribu rupiah
Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH Konsumsi	87,7	88,87	88,90
Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	84,77 (A)	85,23 (A)	85,25 (A)

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2023 sampai dengan 2025, secara umum pelaksanaan program pada sektor pertanian dan perikanan menunjukkan dinamika yang cukup baik meskipun terdapat beberapa fluktuasi pada indikator tertentu. Dalam rangka mewujudkan tujuan strategis yaitu **terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan, indikator PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun cenderung menguat pada akhir periode. Pada tahun 2023, nilai PDRB tercatat sebesar Rp213,52 miliar, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi Rp200,43 miliar. Penurunan ini sejalan dengan tekanan produksi akibat faktor iklim dan dinamika harga input. Namun demikian, pada tahun berikutnya nilai PDRB meningkat signifikan menjadi Rp214,73 miliar, melampaui capaian tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan adanya pemulihan dan penguatan struktur produksi sektor pertanian dan perikanan.

Pada sasaran **meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan**, perkembangan antar subsektor menunjukkan kecenderungan yang beragam. Produksi tanaman pangan dan hortikultura mengalami penurunan cukup signifikan dari 240.477 kwintal pada tahun 2023 menjadi 173.776,40 kwintal pada tahun 2024. Pada tahun 2025 terjadi peningkatan menjadi 205.496,40 kwintal, meskipun belum kembali ke capaian tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan adanya gangguan produksi pada periode sebelumnya, namun telah dilakukan upaya pemulihan yang memberikan hasil positif.

Sebaliknya, produksi hasil peternakan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 100.122,81 kwintal pada tahun 2023 menjadi 104.314,32 kwintal pada tahun 2024 dan meningkat kembali menjadi 110.431,36 kwintal pada tahun 2025. Hal ini menandakan bahwa subsektor peternakan memiliki ketahanan dan potensi pertumbuhan yang cukup baik.

Pada subsektor perikanan budidaya, produksi ikan konsumsi meningkat secara bertahap dari 2.485,00 kwintal pada tahun 2023 menjadi 2.503,40 kwintal pada tahun 2024 dan 2.524,1 kwintal pada tahun 2025. Produksi ikan hias juga menunjukkan tren peningkatan dari 4.719.733 ekor pada tahun 2023 menjadi 4.762.541 ekor pada tahun 2025. Peningkatan yang stabil ini menunjukkan keberlanjutan usaha budidaya dan terjaganya permintaan pasar.

Pada sasaran **meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan**, nilai produksi hasil pertanian meningkat signifikan dari 115.849.972 ribu rupiah pada tahun 2024 menjadi 144.256.288 ribu rupiah pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan pada aspek pemasaran, harga jual, maupun nilai tambah produk. Sementara itu, nilai produksi hasil perikanan juga mengalami peningkatan dari 37.829.168 ribu rupiah menjadi 38.055.118 ribu rupiah. Walaupun kenaikannya relatif moderat, tren positif ini mencerminkan stabilitas pasar perikanan.

Dalam hal **tercukupinya konsumsi pangan masyarakat**, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) meningkat dari 87,7 pada tahun 2023 menjadi 88,87 pada tahun 2024 dan 88,90 pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan kualitas dan keberagaman konsumsi pangan masyarakat, yang mencerminkan kondisi ketahanan pangan daerah yang semakin baik.

Adapun pada sasaran **meningkatnya kinerja perangkat daerah**, Nilai SAKIP PD menunjukkan peningkatan dari 84,77 (kategori A) pada tahun 2023 menjadi 85,23 (A) pada tahun 2024 dan 85,25 (A) pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja telah berjalan secara efektif dan konsisten dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa indikator, Khususnya Pada Produksi Tanaman Pangan Dan Kontribusi PDRB, Sektor Pertanian Dan perikanan tetap menunjukkan kinerja yang relatif stabil dengan tren perbaikan pada aspek produksi peternakan, perikanan, nilai pemasaran, kualitas konsumsi pangan, serta tata kelola perangkat daerah. Ke depan, diperlukan penguatan pada peningkatan produktivitas tanaman pangan, stabilisasi nilai tambah produk, serta optimalisasi hilirisasi guna mendorong pertumbuhan kontribusi sektor terhadap perekonomian daerah secara berkelanjutan.

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target S/D Akhir Periode Renstra

Tabel. 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja S/D Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	milyar rupiah	200,79	214,73	107,13
Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	kwintal	198.563,73	205.496,40	103,49
	Jumlah produksi hasil peternakan	kwintal	85.356,30	110.431,36	129,38
	Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi	kwintal	2.549,33	2.524,10	99,01
	Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias	ekor	4.783.627	4.762.541	99,56
Meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan	Nilai produksi hasil pertanian	ribu rupiah	95.905.554,00	144.256.288,00	150,41
	Nilai produksi hasil perikanan	ribu rupiah	36.390.897,28	38.055.118,00	104,57
Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH Konsumsi	angka	88,5	88,90	100,45
Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	angka	84,77	85,25	100,57

Berdasarkan perbandingan antara target akhir Renstra dengan realisasi kinerja, secara umum capaian pada seluruh sasaran strategis menunjukkan hasil yang sangat baik. Mayoritas indikator telah melampaui target yang ditetapkan, meskipun terdapat beberapa indikator yang realisasinya masih sedikit di bawah target namun tetap berada dalam kategori sangat mendekati. Pada sasaran **terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan**, indikator PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ditargetkan sebesar Rp200,79 miliar dan terealisasi Rp214,73 miliar atau mencapai 107,13 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor terhadap perekonomian daerah tidak

hanya terjaga, tetapi juga tumbuh melampaui proyeksi jangka menengah. Hal ini mengindikasikan adanya penguatan struktur produksi serta peningkatan nilai tambah di sektor pertanian dan perikanan.

Pada sasaran meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan, kinerja antar subsektor menunjukkan variasi capaian. Produksi tanaman pangan dan hortikultura ditargetkan sebesar 198.563,73 kwintal dan terealisasi 205.496,40 kwintal atau 103,49 persen. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan produktivitas dan optimalisasi lahan berjalan efektif serta mampu melampaui target perencanaan. Produksi hasil peternakan menunjukkan capaian paling signifikan, dengan realisasi sebesar 110.431,36 kwintal dari target 85.356,30 kwintal atau 129,38 persen. Capaian ini mencerminkan pertumbuhan yang kuat pada subsektor peternakan dan menjadi salah satu faktor pendorong utama peningkatan kinerja sektor pertanian secara keseluruhan. Sementara itu, produksi budidaya ikan konsumsi terealisasi sebesar 2.524,10 kwintal dari target 2.549,33 kwintal atau 99,01 persen. Produksi ikan hias mencapai 4.762.541 ekor dari target 4.783.627 ekor atau 99,56 persen. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, selisih capaian relatif kecil sehingga masih menunjukkan stabilitas produksi dan keberlanjutan usaha budidaya perikanan.

Untuk sasaran meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan, nilai produksi hasil pertanian menunjukkan capaian yang sangat tinggi, yaitu sebesar 144.256.288 ribu rupiah dari target 95.905.554 ribu rupiah atau 150,41 persen. Hal ini menandakan adanya peningkatan signifikan pada aspek pemasaran, harga jual, maupun nilai tambah produk. Dengan kata lain, tidak hanya kuantitas produksi yang meningkat, tetapi juga kualitas ekonomi hasil produksi. Nilai produksi hasil perikanan juga melampaui target, dengan realisasi sebesar 38.055.118 ribu rupiah dari target 36.390.897,28 ribu rupiah atau 104,57 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa sektor perikanan mampu menjaga stabilitas pasar dan meningkatkan kontribusi ekonominya.

Pada sasaran tercukupinya konsumsi pangan masyarakat, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ditargetkan sebesar 88,5 dan terealisasi 88,90 atau mencapai 100,45 persen. Hal ini mencerminkan semakin baiknya kualitas dan keberagaman konsumsi pangan masyarakat, serta menunjukkan kondisi ketahanan pangan daerah yang semakin kuat.

Adapun pada sasaran meningkatnya kinerja perangkat daerah, Nilai SAKIP PD terealisasi sebesar 85,25 dari target 84,77 atau 100,57 persen. Capaian ini menunjukkan

konsistensi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Secara keseluruhan, capaian terhadap target akhir Renstra menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan sebagian besar indikator melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh peningkatan produktivitas pada subsektor tanaman pangan dan peternakan, penguatan nilai tambah dan pemasaran hasil produksi, serta tata kelola perangkat daerah yang semakin efektif. Ke depan, perlu dilakukan penguatan pada subsektor perikanan budidaya agar capaian dapat sepenuhnya melampaui target, serta menjaga keberlanjutan peningkatan nilai tambah guna mempertahankan kontribusi sektor terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara berkesinambungan.

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional Dan Daerah Sekitar

Evaluasi kinerja pembangunan Kota Blitar tidak cukup hanya melihat pencapaian terhadap target internal, tetapi juga perlu dibandingkan dengan capaian daerah sekitar yang memiliki karakteristik serupa. Perbandingan ini penting untuk mengetahui posisi daya saing daerah, apakah sudah unggul, setara, atau masih tertinggal.

Analisis komparatif juga membantu mengidentifikasi praktik baik yang dapat diadopsi serta mengukur apakah peningkatan kinerja dipengaruhi faktor kebijakan daerah atau faktor eksternal seperti tren harga dan kondisi pasar regional. Selain itu, mengingat keterkaitan rantai pasok dan distribusi antar wilayah, pemahaman terhadap dinamika daerah sekitar akan memperkuat perumusan strategi pembangunan yang lebih adaptif dan berdaya saing.

Tabel. 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional Dan Daerah Sekitar

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional Tahun 2025	Realisasi Daerah Sekitar				Keterangan
			Kab. Blitar	Kota Malang	Kota Madiun	Kota Kediri	
PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	214,73 milyar	-	15.508,94 milyar	207,84 milyar	132,84 Miliar	393,99 Miliar	Sumber BPS
Nilai SAKIP	85,25 (A)	-	79,40 (BB)	tidak tersedia data	tidak tersedia data	tidak tersedia data	BPS, Dinas Peterenakan dan Perikanan Kab. Blitar
produksi hasil budidaya ikan konsumsi	2.524,1 kwintal	-	172.703.000 kwintal	1620 kwintal	tidak tersedia data	tidak tersedia data	BPS, Dinas Peterenakan dan Perikanan Kab. Blitar
Produksi hasil budidaya Ikan Hias	4.762.541 ekor	-	205.230.494 ekor	-	tidak tersedia data	tidak tersedia data	BPS, Dinas Peterenakan dan Perikanan Kab. Blitar
Produksi hasil peternakan	110.431,36 kwintal	-	554.006.879,44 kwintal	27.044,34 kwintal	tidak tersedia data	tidak tersedia data	BPS, Dinas Peterenakan dan Perikanan Kab. Blitar
Produksi Tanaman pangan dan Hortikultura	205.496,40 kwintal	-	9.621.415 kwintal	119.401 kwintal	133.413 kwintal	58.779,77 kwintal	BPS
Skor PPH	88,9	95,1	96,9	96,9	96,4	96,09	Bapanas, Dinas yang menanggapi urusan pangan di kab/kota

Berdasarkan data realisasi tahun 2025, kinerja sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan menunjukkan capaian yang relatif baik secara internal, serta cukup kompetitif dibandingkan beberapa daerah sekitar. Namun demikian, terdapat perbedaan signifikan jika dibandingkan dengan wilayah yang memiliki basis agraris lebih luas.

Pada indikator PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, realisasi daerah tercatat sebesar 214,73 miliar rupiah. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan Kota Malang sebesar 207,84 miliar rupiah dan Kota Madiun sebesar 132,84 miliar rupiah, namun masih berada di bawah Kota Kediri yang mencapai 393,99 miliar rupiah dan kabupaten Blitar yang mencapai 15.508,94 milyar. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor primer masih memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah, meskipun kapasitas ekspansi dan nilai tambahnya belum sebesar wilayah dengan orientasi perdagangan dan distribusi yang lebih kuat.

Dari aspek tata kelola, Nilai SAKIP tahun 2025 mencapai 85,25 dengan predikat A, lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Blitar yang memperoleh nilai 79,40 (predikat BB). Capaian ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas kinerja telah berjalan efektif. Dengan demikian, tantangan utama ke depan bukan pada sistem manajemen kinerja, melainkan pada peningkatan dampak program terhadap produktivitas dan kesejahteraan pelaku usaha sektor pertanian dan perikanan.

Pada indikator produksi perikanan budidaya konsumsi, realisasi mencapai 2.524,1 kwintal. Angka ini lebih tinggi dibanding Kota Malang yang mencatat 1.620 kwintal, namun sangat jauh di bawah Kabupaten Blitar yang mencapai 172.703.000 kwintal. Perbedaan ini mencerminkan disparitas luas lahan, skala usaha, serta orientasi produksi. Daerah ini cenderung memiliki keterbatasan ruang budidaya sehingga produksi bersifat skala menengah dan berorientasi pada pasar lokal.

Untuk produksi ikan hias, realisasi sebesar 4.762.541 ekor masih tertinggal jauh dibandingkan Kabupaten Blitar yang mencapai 205.230.494 ekor. Meskipun demikian, potensi pengembangan tetap terbuka melalui strategi diferensiasi produk, peningkatan kualitas, dan penguatan akses pasar digital.

Pada sektor peternakan, produksi mencapai 110.431,36 kwintal, lebih tinggi dibanding Kota Malang sebesar 27.044,34 kwintal, namun masih jauh di bawah Kabupaten Blitar yang mencatat 554.006.879,44 kwintal. Kondisi ini menunjukkan bahwa skala usaha

peternakan relatif terbatas dan memerlukan peningkatan produktivitas melalui perbaikan manajemen pakan, bibit, dan teknologi budidaya.

Pada indikator produksi tanaman pangan dan hortikultura, realisasi sebesar 205.496,40 kwintal berada di atas capaian Kota Malang (119.401 kwintal), Kota Madiun (133.413 kwintal), dan Kota Kediri (58.779,77 kwintal). Namun capaian ini masih jauh di bawah Kabupaten Blitar yang mencapai 9.621.415 kwintal. Posisi ini menunjukkan bahwa untuk karakteristik wilayah yang tidak sepenuhnya agraris, produktivitas relatif kompetitif di antara kota-kota sekitar.

Sementara itu, pada indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH), nilai daerah sebesar 88,9 masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 95,1 serta di bawah capaian Kabupaten Blitar (96,9), Kota Malang (96,9), Kota Madiun (96,4), dan Kota Kediri (96,09). Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat masih perlu ditingkatkan, meskipun dari sisi produksi relatif cukup baik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kapasitas produksi dan pola konsumsi masyarakat.

Secara keseluruhan, kinerja sektor pertanian, perikanan, dan peternakan tahun 2025 menunjukkan fondasi tata kelola yang kuat serta posisi produksi yang cukup kompetitif dibandingkan kota-kota sekitar. Namun, jika dibandingkan dengan kabupaten agraris berskala besar, terdapat keterbatasan struktural pada luas lahan dan skala usaha. Selain itu, kualitas konsumsi pangan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan intervensi kebijakan berbasis edukasi gizi, diversifikasi pangan, dan penguatan distribusi pangan lokal.

Dengan strategi yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah, hilirisasi produk, intensifikasi berbasis teknologi, serta penguatan pola konsumsi beragam dan bergizi seimbang, sektor ini berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa mendatang.

B. Akuntabilitas Keuangan / Cost Per Outcome

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan, dalam Laporan ini dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung yang merupakan Anggaran yang digunakan secara langsung untuk program pembangunan. Pengukuran kinerja keuangan per tujuan dan/atau sasaran yang menjadi kinerja utama (*cost per outcome*). Sedangkan untuk pengambilan kesimpulan dalam penghitungan akuntabilitas keuangan dilakukan evaluasi lanjutan dalam bentuk rasio ekonomi dan rasio efisiensi yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Rasio Ekonomi, merupakan nilai perbandingan antara realisasi anggaran belanja dibandingkan dengan rencana anggaran belanja, dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Rencana Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

2. Rasio Efisiensi, merupakan perbandingan antara rasio ekonomi dengan capaian kinerja, dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Rasio Ekonomi}}$$

Bila Rasio Efisiensi > 1 maka dapat dikatakan bahwa penggunaan sumberdaya EFISIEN. Sebaliknya, bila Rasio Efisiensi < 1 maka dapat dikatakan bahwa penggunaan sumberdaya TIDAK EFISIEN.

B.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Tabel. 3.7
Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025

	Indikator	Anggaran	% Anggaran
Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	3.962.333.782,00	27,89
	Jumlah produksi hasil peternakan	510.075.800,00	3,59
	Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi	294.117.656,00	2,07
	Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias		
Meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan	Nilai produksi hasil pertanian	1.375.000,00	0,01
	Nilai produksi hasil perikanan	99.611.100,00	0,70
Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	177.048.000,00	1,25
Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	9.163.739.250,00	64,50
		14.208.300.588,00	100,00

Struktur alokasi anggaran yang berorientasi pada peningkatan kinerja perangkat daerah, peningkatan produksi sektor pertanian–perikanan, pemasaran hasil, serta pemenuhan konsumsi pangan masyarakat dengan total anggaran sebesar

Rp14.208.300.588,00. Anggaran terbesar dialokasikan untuk indikator meningkatnya kinerja perangkat daerah (Nilai SAKIP PD) sebesar Rp9.163.739.250 atau 64,50% dari total anggaran.

Pada indikator meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan, total alokasi mencapai sekitar 33,55% yang terbagi ke beberapa komoditas utama yaitu :

- Produksi tanaman pangan dan hortikultura: Rp3.962.333.782 (27,89%) – menjadi porsi terbesar dalam sektor produksi, menunjukkan prioritas pada komoditas strategis pangan dan hortikultura.
- Produksi hasil peternakan: Rp510.075.800 (3,59%) – mendukung peningkatan populasi dan produktivitas ternak.
- Produksi budidaya ikan konsumsi: Rp294.117.656 (2,07%) – diarahkan untuk menjaga pasokan protein hewani dan pengembangan usaha budidaya.
- Produksi budidaya ikan hias: belum tercantum alokasi anggaran, mengindikasikan kemungkinan masih terintegrasi dalam kegiatan lain atau belum menjadi prioritas penganggaran tersendiri.

Untuk indikator meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan, alokasi relatif kecil yaitu:

- Nilai produksi hasil pertanian: Rp1.375.000 (0,01%)
- Nilai produksi hasil perikanan : Rp99.611.100 (0,70%).

Total porsi pemasaran hanya sekitar 0,71%, menunjukkan bahwa intervensi masih lebih berfokus pada sisi produksi dibanding penguatan rantai nilai dan akses pasar.

Pada indikator tercukupinya konsumsi pangan masyarakat, alokasi untuk Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar Rp177.048.000 (1,25%), yang diarahkan pada peningkatan kualitas konsumsi dan keberagaman pangan masyarakat.

B.2 Pencapaian Kinerja Dan Anggaran

Tabel. 3.8
Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Per Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2025

Sasaran Startegis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	220.141	205.496,40	93,35	3.962.333.782	3.605.970.124	91,01
	Jumlah produksi hasil peternakan	104.320	110.431,36	105,86	510.075.800	501.336.704	98,29
	Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi	2.510	2.524,10	100,56	294.117.656	289.493.363	98,43
	Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias	4.743.000	4.762.541	100,41			
Meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan	Nilai produksi hasil pertanian	116.429.221	144.256.288	123,90	1.375.000	1.325.000	96,36
	Nilai produksi hasil perikanan	38.018.313	38.055.118	100,10	99.611.100	95.800.050	96,17
Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	88,90	88,90	100,00	177.048.000	172.020.325	97,16
Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	A (85,25)	A (85,25)	100	9.163.739.250	8.432.051.335	92,02
Jumlah					14.208.300.588	13.097.996.901	92,12



Berdasarkan data realisasi kinerja dan anggaran, secara umum pelaksanaan program menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang baik. Rata-rata capaian kinerja berada pada kategori tercapai hingga melampaui target, dengan realisasi anggaran sebesar 13.097.996.901 rupiah dari total pagu 14.208.300.588 rupiah atau 92,12 persen.

B.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel. 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tahun Anggaran 2025

Sasaran Strategis	Indikator	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	93,35	91,01	1,03	Efisien
	Jumlah produksi hasil peternakan	105,86	98,29	1,08	Efisien
	Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi	100,56	98,43	1,02	Efisien
	Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias	100,41			
Meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan	Nilai produksi hasil pertanian	123,90	96,36	1,29	Efisien
	Nilai produksi hasil perikanan	100,10	96,17	1,04	Efisien
Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	100,00	97,16	1,03	Efisien
Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	100,00	92,02	1,09	Efisien

Berdasarkan data capaian kinerja dan realisasi anggaran, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan menunjukkan kinerja yang efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian sasaran strategis sektor pertanian, perikanan, ketahanan pangan, dan kinerja perangkat daerah.

Pada sasaran strategis meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan, seluruh indikator menunjukkan capaian yang baik dan efisien. Produksi tanaman pangan dan hortikultura mencapai 93,35% dari target dengan realisasi anggaran 91,01% dan tingkat efisiensi **1,03**, yang menunjukkan bahwa output hampir mencapai target dengan penggunaan anggaran yang optimal. Produksi hasil peternakan bahkan melampaui target dengan capaian 105,86% dan serapan anggaran 98,29%, serta tingkat efisiensi **1,08**, menandakan bahwa peningkatan produksi mampu dicapai secara efektif tanpa pemborosan anggaran.

Produksi budidaya ikan konsumsi juga menunjukkan kinerja positif dengan capaian 100,56% dan realisasi anggaran 98,43%, sehingga tergolong efisien dengan rasio **1,02**. Sementara itu, produksi budidaya ikan hias mencapai 100,41%, yang mengindikasikan target produksi telah tercapai bahkan sedikit melampaui, meskipun data efisiensi anggaran tidak tercantum secara rinci. Secara keseluruhan, kinerja subsektor produksi memperlihatkan kemampuan optimal dalam mengonversi anggaran menjadi output produksi.

Pada sasaran meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan, kinerja yang dicapai sangat baik. Nilai produksi hasil pertanian mencapai 123,90% dengan realisasi anggaran 96,36% dan tingkat efisiensi **1,29**, yang menunjukkan bahwa peningkatan nilai produksi melampaui target secara signifikan dengan pemanfaatan anggaran yang relatif hemat. Nilai produksi hasil perikanan juga tercapai 100,10% dengan serapan anggaran 96,17% dan tingkat efisiensi **1,04**, menandakan pemasaran produk perikanan berjalan efektif dan efisien.

Untuk sasaran tercukupinya konsumsi pangan masyarakat, indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi mencapai 100% dengan realisasi anggaran 97,16% dan efisiensi **1,03**. Hal ini menunjukkan bahwa program peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat berjalan sesuai target dengan penggunaan anggaran yang optimal.

Pada sasaran meningkatnya kinerja perangkat daerah, nilai SAKIP perangkat daerah mencapai 100% dengan realisasi anggaran 92,02% dan tingkat efisiensi **1,09**. Capaian ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dapat diwujudkan secara efektif dengan pemanfaatan anggaran yang efisien.

Secara keseluruhan, hampir seluruh indikator kinerja menunjukkan capaian minimal 100% atau mendekati target dengan tingkat efisiensi di atas 1, yang menandakan bahwa pelaksanaan program berjalan efektif, efisien, dan memberikan hasil optimal. Keberhasilan ini mencerminkan sinergi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program yang baik. Ke depan, konsistensi efisiensi dan peningkatan kualitas output diharapkan tetap dipertahankan, disertai penguatan pada indikator yang belum sepenuhnya optimal agar kinerja sektor pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan semakin berkelanjutan.

C. Prestasi/Penghargaan

1. Nilai Sakip OPD Tahun 2025 dengan Predikat A (Memuaskan) dengan nilai 85,25;
2. Peringkat II Kota Dengan Kinerja Pengendalian PMK Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
3. UPT RPH : Unit Usaha Yang Berkomitmen Dalam Penerapan Halal dan Penjaminan Higiene Sanitasi (NKV) Sebagai Wujud Kepatuhan Terhadap Standar Keamanan Pangan dan Syariat Islam di Jawa Timur dari Gubernur Jawa Timur;
4. Apresiasi Kabupaten/Kota dengan Kontribusi PAD Melalui Penggunaan SKKH Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Ketua Satgas Penanganan PMK Provinsi Jawa Timur.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang telah dipergunakan selama satu tahun 2025.

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar disusun berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar 2021-2026, dokumen Renja 2025, serta Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dalam laporan ini mengukur kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan Tujuan Renstra yang telah ditetapkan menjadi Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, yang terdiri atas tujuan dan sasaran yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berdasarkan data capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis, secara umum pelaksanaan program urusan pertanian, perikanan, ketahanan pangan, dan kinerja perangkat daerah menunjukkan hasil **sangat berhasil** dengan tingkat pencapaian yang optimal terhadap target yang telah ditetapkan.

Pada sasaran **terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan**, indikator PDRB kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan berhasil direalisasikan sebesar **214,73 miliar rupiah** atau **107,13%** dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa sektor pertanian dan perikanan mampu mempertahankan kontribusi ekonomi secara stabil dan konsisten, serta berperan penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada sasaran **meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan**, sebagian besar indikator produksi menunjukkan kinerja yang sangat baik. Produksi tanaman pangan dan hortikultura terealisasi sebesar **205.496,40 kwintal** atau **93,35%** dari target. Meskipun belum mencapai target penuh, capaian ini tetap dikategorikan sangat berhasil karena produksi masih berada pada level tinggi dan stabil di tengah berbagai tantangan seperti perubahan iklim, fluktuasi harga sarana produksi, serta alih fungsi lahan.

Produksi hasil peternakan justru melampaui target dengan realisasi **110.431,36 kwintal** atau **105,86%**, menunjukkan peningkatan produktivitas dan keberhasilan program pengembangan peternakan. Produksi budidaya ikan konsumsi mencapai **2.524,10 kwintal** atau **100,56%**, sedangkan produksi ikan hias mencapai **4.762.541 ekor** atau **100,41%** dari target. Hal ini mencerminkan bahwa subsektor perikanan budidaya, baik

konsumsi maupun ikan hias, berkembang dengan baik dan mampu memenuhi bahkan melampaui target yang telah direncanakan.

Pada sasaran **meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan**, nilai produksi hasil pertanian menunjukkan kinerja sangat tinggi dengan realisasi sebesar **144.256.288 ribu rupiah** atau **123,90%** dari target. Capaian ini mengindikasikan peningkatan nilai tambah, harga jual, serta daya serap pasar terhadap produk pertanian. Nilai produksi hasil perikanan juga mencapai **100,10%**, yang menandakan stabilitas pemasaran dan daya saing produk perikanan di pasar.

Pada sasaran **tercukupinya konsumsi pangan masyarakat**, indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi tercapai **100%** dengan nilai indeks **88,90**. Hal ini menunjukkan kualitas konsumsi pangan masyarakat berada pada kondisi yang sesuai target, serta mencerminkan keberhasilan program diversifikasi dan peningkatan kesadaran konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Sementara itu, pada sasaran **meningkatnya kinerja perangkat daerah**, nilai SAKIP perangkat daerah berhasil dipertahankan pada predikat **A (85,25)** dengan capaian **100%**. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan, akuntabilitas kinerja, serta efektivitas pelaksanaan program berjalan sangat baik dan konsisten.

B. SARAN

Dari hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu perlunya upaya yang lebih efektif dan efisien dalam penjaminan ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat. Demikian halnya koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait akan terus ditingkatkan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan /atau sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar yang telah ditetapkan. Langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline (Tahun)		
					2026 (murni)	2026 (perubahan)	2027
1	Belum optimalnya kemandirian peternak dan pembudidaya ikan	Peningkatan kemandirian peternak dan pembudidaya ikan melalui pelatihan	- Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian - Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota - Sub kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Terlaksananya pelatihan pembuatan pakan ternak			√

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline (Tahun)		
					2026 (murni)	2026 (perubahan)	2027
			- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya pelatihan pembuatan pakan ikan			√
2	Masih kurangnya kualitas evaluasi dan perencanaan kinerja.	Pengembangan aplikasi data pangan, pertanian dan perikanan	- Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	- Penambahan kinerja dan indicator kinerja sesuai dengan Renstra Baru - Perbaikan tampilan aplikasi Sipetani			√
3	Belum optimalnya kualitas dan nilai tambah serta jangkauan pemasaran produk perikanan.	Meningkatkan mutu produk melalui pelatihan pengemasan hasil olahan perikanan	- Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan - Kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil - Sub Kegiatan pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Terlaksananya pelatihan pengemasan produk olahan perikanan untuk pengiriman jarak jauh			√

Demikian, semoga dokumen LKJIP ini dapat berguna bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian khususnya sebagai evaluasi untuk perbaikan di masa depan, serta bagi segenap pihak yang berkepentingan.



Blitar, 28 Februari 2026
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

dh Dewi Masitoh., M.Agr.
Pembina Tingkat 1 (Ivb)
Nip 197906122026042005

LAMPIRAN 1.

MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BLITAR TAHUN 2021 - 2026

Visi : Terwujudnya Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermatabat
Misi : Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET						
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2024	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN							
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (angka)	Pembobotan 9 (Sembilan) indicator turunan dari 3 (tiga) aspek ketahanan (ketersediaan , keterjangkauan, pemanfaatan pangan) IKP dihitung oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional.	73,38	75,68	Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Skor PPH ideal = 100	85,25	87	Peningkatan pembangunan bidang ketahanan pangan	Optimalisasi produktivitas sumber daya hewani dan nabati sebagai sumber pangan	Urusan Pangan						
	Pangsa Pengeluaran Pangan Per Kapita	Rata-rata pengeluaran untuk pangan per kapita (Rp.) di bagi Rata-rata pengeluaran total per kapita (Rp.) di kalikan 100%	NA	42,16							Optimalisasi pencegahan masuk dan keluarnya pangan mengandung bahan berbahaya							
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutan an, dan Perikanan (milyar rupiah)	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (dalam milliar) yang dikeluarkan oleh BPS Kota Blitar	197,81	199,79	Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikul tura (dalam kwintal)	Jumlah total produksi tanaman pangan dan hortikultura dalam 1 tahun (kwintal)	197.890	198.44,66	Peningkatan produksi tanaman pangan dan tanaman hortikultura	Peningkatan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Urusan Pertanian						
	Nilai Tukar Petani	NTP = IT/IB X 100 % IT : Indeks Harga Yang Diterima Petani IB : Indeks Harga Yang Harus Dibayar Petani	NA	102,17							Peningkatan pengendalian Organisme pengganggu tanaman OPT							
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	NTP = IT/IB X 100 % IT : Indeks Harga Yang Diterima Pembudiaya ikan IB : Indeks Harga Yang Harus Dibayar Pembudidaya Ikan	NA	101,5							Peningkatan ketersediaan sarana pertanian							
											Peningkatan kapasitas SDM petani							

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2024	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
											Penerapan metode budidaya berorientasi agribisnis	
											Peningkatan pemasaran produk tanaman pangan dan hortikultura secara digital	
						Jumlah produksi hasil peternakan (dalam kwintal)	Jumlah total produksi hasil peternakan (telur, susu, daging) dalam 1 tahun (kwintal).	83.818	85.042,36	Peningkatan sarana dan prasarana produksi peternakan	Peningkatan pengawasan produksi hasil peternakan ternak	
											Peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak	
											Peningkatan pengawasan produksi hasil peternakan ternak	
										Peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner	Peningkatan pendampingan unit usaha peternak dan hasil hewan ternak dalam proses sertifikasi halal dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	
											Peningkatan penanganan penyakit hewan ternak	
											Peningkatan pengawasan produksi hasil peternakan ternak	
						Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi (dalam kwintal)	Jumlah total produksi ikan konsumsi dalam 1 tahun (kwintal)	2310,3	2.519,10	Peningkatan produksi dan pemasaran produk perikanan budidaya	Peningkatan kapasitas SDM pembudidaya perikanan	Urusan Perikanan
						Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias (ekor)	Jumlah total produksi ikan hias (ekor) dalam 1 tahun	4.563.416	4.762.197		Peningkatan pemenuhan benih ikan	

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAIPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2024	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
					Meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan	Nilai produksi hasil pertanian (000 rupiah)	Jumlah produksi hasil pertanian (kg) x harga tingkat petani (Rp./Kg.)	NA	94.025.053,58	Peningkatan produksi tanaman pangan dan tanaman hortikultura	Peningkatan pemasaran produk tanaman pangan dan hortikultura secara digital	Urusan Pertanian
						Nilai produksi hasil perikanan (000 Rupiah)	Nilai produksi hasil perikanan segar + omset usaha produk olahan hasil perikanan. Nilai produksi hasil perikanan segar = Jumlah produksi hasil perikanan (kg) x harga tingkat pembudidaya (Rp./Kg.)	NA	35.677.350,27	Peningkatan produksi dan pemasaran produk perikanan budidaya	Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berbasis digital	Urusan Perikanan
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	83,92	84,75	Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	83,92	84,75	Peningkatan kinerja pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran perangkat daerah berbasis kinerja Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif	



Blitar, 3 Januari 2025
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

drh. Dewi Masitoh., M.Agr.
Pembina Tingkat 1 (Ivb)
Nip 197906122026042005

LAMPIRAN 2.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	85,25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IkM)	81,5 Indeks	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Tepat Waktu dan Sesuai Standar	100 Persen	16.809.400
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2.810.000
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	13.999.400
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat daerah Sesuai Standar	100 Persen	6.876.467.889
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 orang/bulan	6.873.697.889
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	2.770.000
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Sesuai Standar	100 %	102.654.641
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	10.000.000
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	98 orang	92.654.641
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Standar	100 Persen	248.179.040
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	11.805.000
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	41.799.000
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	24.692.000
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	28.490.000
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	14.705.620

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	14.940.000
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan	96.547.420
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	15.200.000
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	168.350.964
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	36.119.300
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	18.240.000
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	61.184.744
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	52.806.920
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Sesuai Standar	100 %	1.508.362.244
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216 Laporan	193.255.664
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1.315.106.580
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang Terpelihara Sesuai Standar	100 Persen	242.915.072
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit	100.128.100
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 unit	54.030.400
						Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 unit	25.000.000
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	63.756.572
Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	88,9	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Ketersediaan Energi Perkapita/Hari	2200 kkal/kapita/hari	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Nilai Capaian Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	100 Angka	44.807.300

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
				Angka Konsumsi Energi Perkapita	2150 kkal/kapita/hari	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	2 unit	43.634.100
						Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	2 Dokumen	1.173.200
						Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Konsumsi Protein	57 gr/kapita/tahun	78.706.600
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	27.806.600
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	50.900.000
						Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Balita Rawan Pangan Yang Tertangani	62 Persen	39.299.100
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Tingkat Keamanan Pangan Segar (%)	100 Persen	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	39.299.100
						Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Sampel Pangan Segar yang Diuji	100 %	14.235.000
						Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	14.235.000
						Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh pembinaan/ pelatihan/ pendampingan pengelolaan pembudidayaan ikan	60 %	138.425.300
Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Produksi hasil budidaya ikan konsumsi (dalam kwintal)	2.510,00	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Kelompok Perikanan Budidaya yang Memenuhi Rekomendasi Standart Teknis	26,31 Persen	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2 kelompok	88.515.900
	Produksi hasil budidaya ikan hias (ekor)	4.743.000		Persentase Pemenuhan Benih Ikan yang Berkualitas	17,21 Persen	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 kelompok	49.909.400
						Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Pembudidaya Ikan yang Memenuhi Standart Mutu Budidaya Perikanan	5 %	155.692.356

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
						Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3.627.800
						Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	117.842.556
						Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	50 unit	34.222.000
Meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan	Nilai produksi hasil perikanan (000 rupiah)	38.018.313,00	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Volume Penjualan Hasil Olahan Perikanan	38018 juta rupiah	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Pelaku Usaha Olahan Hasil Perikanan yang Sudah Memenuhi Standar Mutu	34,78 %	18.439.200
						Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	2 unit usaha	18.439.200
						Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Angka Konsumsi Ikan Perkapita/tahun	21,5 kg/kap/th	81.171.900
						Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 ton	56.741.900
						Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	20 Pelaku Usaha	24.430.000
						Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peternak yang dibina	40 %	78.924.700
Terjaganya produksi hasil peternakan	Jumlah produksi hasil peternakan (dalam kwintal)	104.320,00	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak	98,25 Persen	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen	78.924.700
				Persentase pelaku usaha obat hewan yang sesuai standar)	55,00 Persen	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Penggunaan Pakan Ternak yang Sesuai Standar	100 %	23.930.100
						Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	2 Laporan	18.827.000

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
						Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	5.103.100
						Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase Obat Hewan yang Sudah Teregister	95,3 Persen	4.243.000
						Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	4.243.000
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase produk RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)	100 Persen	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana RPH yang ditingkatkan	80 Persen	168.412.200
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar Persentase penyakit hewan ternak yang tertangani	48,00 Persen 65,00 Persen 100 Persen	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	3 unit	168.412.200
						Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kejadian Kasus Penyakit Zoonosis	0 angka	45.589.300
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	42 orang	45.589.300
						Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Layanan Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang Tersedia	90 Persen	148.592.700
						Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Laporan	25.679.500
						Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	5 Laporan	122.913.200
						Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Produk Hewan yang Dibina	88 %	25.930.000
						Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	8.811.000
						Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	21 unit usaha	17.119.000
						Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Prosentase KIE yang yang terlaksana	100 %	9.476.700
						Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	8 unit	9.476.700

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha peternakan dan produk asal hewan yang memenuhi rekomendasi persyaratan teknis	49,23 Persen	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha produksi pakan ternak yang di keluarkan	1 Rekomendasi	3.487.200
						Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	2 Laporan	3.487.200
						Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pengecer obat hewan yang di keluarkan	1 Rekomendasi	1.489.900
						Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	1 Laporan	1.489.900
Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Produksi tanaman pangan dan hortikultura (dalam kwintal)	220.141,42	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase sarana pertanian yang tersedia	73,1 Persen	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	80 %	382.785.000
						Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan	348.086.000
						Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	34.699.000
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik	70,7 Persen	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Data Dukung Raperda LP2B yang Tersedia	100 Persen	13.000.000
						Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Dokumen	2.200.000
						Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B	1 Dokumen	10.800.000
						Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang tersedia	70,33 %	1.499.756.792
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	225.431.700
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	98.827.500
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	85.247.592
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	3 Unit	1.090.250.000

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) sesuai dengan Prosedur	100 Persen	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Bahan Pengendalian OPT	17 %	17.675.000
						Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100 ha	17.675.000
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Pertanian yang Memenuhi Stndar Rekomendasi teknis	42,85 Persen	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Pertanian yang Memenuhi Standar Teknis	20 unit	1.375.000
						Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	1.375.000
			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Rata-rata Peningkatan Nilai Kelas Kelompok Tani	0,93 Persen	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Petani yang Menerima Peningkatan Kapasitas SDM	45 %	2.049.116.990
				Persentase Kelompok Tani yang Menerapkan Metode Budidaya Berorientasi Agribisnis	19,05 Persen	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 unit	5.500.000
Meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan	Nilai Produksi Hasil Pertanian (000 rupiah)	116.429.221,00		Persentase Produk Tanaman Pangan, Hortikultura yang dipasarkan secara Digital	33,33 Persen	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	41 unit	1.970.469.790
						Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3 unit	187.200
						Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	16 orang	72.960.000
TOTAL									14.208.300.588



Blitar, 20 Oktober 2025
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

drh. Dewi Masitoh., M.Agr.
Pembina Tingkat 1 (Ivb)
Nip 197906122026042005

LAMPIRAN 3.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **drh. DEWI MASITOH, M.Agr.**
Jabatan : **KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.**
Jabatan : **Walikota Blitar**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA BLITAR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	200,43 (milyar rup)
2	Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan	Produksi tanaman pangan dan hortikultura	220.141,42(kwintal)
		Produksi hasil peternakan	104.320 (kwintal)
		Produksi hasil budidaya ikan konsumsi	2.510 (kwintal)
		Produksi hasil budidaya ikan hias	4.743.000 (ekor)
3	Meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan	Nilai produksi hasil pertanian	116.429.221 (000 Rupiah)
		Nilai produksi hasil perikanan	38.018.313 (000 Rupiah)
4	Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	88,90 (angka)
5	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,25 (angka)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2,049,116,990.00	DAK Non Fisik- Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian, Dana Alokasi Umum (DAU), DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
2	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	99,611,100.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
3	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	6,352,100.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	14,235,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	17,675,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
6	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	39,299,100.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
7	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	294,117,656.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
8	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	229,588,700.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
9	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	123,513,900.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
10	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1,681,168,992.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
11	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	489,882,800.00	Dana Alokasi Umum (DAU), DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,163,739,250.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
Total:		14,208,300,588.00	



LAMPIRAN 4.
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

OPD : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Keterangan
1	Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (dalam milliar) yang dikeluarkan oleh BPS Kota Blitar	213,52	200,43	93,87	Berhasil	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	294.117.656,00	289.493.363,00	98,43	
2	Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan	Produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah total produksi tanaman pangan dan hortikultura dalam 1 tahun (kwintal)	220.141,42	205.496,40	93,35	Sangat Berhasil	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	489.882.800,00	476.644.120,00	97,30	
		Produksi hasil peternakan	Jumlah total produksi hasil peternakan (telur, susu, daging) dalam 1 tahun (kwintal).	104.320,00	110.431,36	105,86	Sangat Berhasil	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.681.168.992,00	1.414.576.155,00	84,14	
		Produksi hasil budidaya ikan konsumsi	Jumlah total produksi ikan konsumsi dalam 1 tahun (kwintal)	2.510,00	2.524,10	100,56	Sangat Berhasil	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	229.588.700,00	225.186.814,00	98,08	
		Produksi hasil budidaya ikan hias	Jumlah total produksi ikan hias (ekor) dalam 1 tahun	4.743.000	4.762.541	100,41	Sangat Berhasil	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	17.675.000,00	16.872.000,00	95,46	
								Program Penyuluhan Pertanian	2.049.116.990,00	1.959.490.124,00	95,63	
3	Meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan	Nilai produksi hasil pertanian	Jumlah produksi hasil pertanian (kg) x harga tingkat petani (Rp./Kg.)	116.429.221	144.256.288,00	123,90	Sangat Berhasil	Program Perizinan Usaha Pertanian	6.352.100,00	38.362.100,00	97,53	
		Nilai produksi hasil perikanan	Nilai produksi hasil perikanan segar + omset usaha produk olahan hasil perikanan.	38.018.313	38.055.118,00	100,10	Sangat Berhasil	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	99.611.100,00	95.800.050,00	96,17	

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Keterangan
			Nilai produksi hasil perikanan segar = Jumlah produksi hasil perikanan (kg) x harga tingkat pembudidaya (Rp./Kg.)									
4	Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH Konsumsi	Komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Skor PPH ideal = 100	88,90	88,90	100,00	Sangat Berhasil	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	123.513.900,00	119.392.250,00	96,66	
								Program Pengawasan Keamanan Pangan	39.299.100,00	38.467.975,00	97,89	
								Program Penanganan Kerawanan Pangan	14.235.000,00	14.160.100,00	99,47	
5	Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	A (85,25)	A (85,25)	100,00	Sangat Berhasil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.163.739.250,00	8.432.051.335,00	92,02	

Blitar, 28 Februari 2026

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

drh. Dewi Masitoh, M.Agr.

Pemimpin Tingkat 1 (IVb)

Np. 197912062006042005

